

**STRATEGI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI PT. BANK
RAKYAT INDONESIA TBK**

**(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit
Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur)**

SKRIPSI

Disusun oleh :

Adie Susilo

135020401111042

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Strategi Pengendalian Internal Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar Kota Pasuruan)"

Yang disusun oleh :

Nama : Adie Susilo
 NIM : 135020400111036
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
 Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **3 November 2017**
 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Asfi Manzilati, SE., ME.
 NIP. 196809111991032003
 (Dosen Pembimbing)
2. Dr. Nurul Badriyah, SE., ME.
 NIP. 197403022005012001
 (Dosen Penguji I)
3. Al Muizzuddin Fazaalloh, SE., ME.
 NIP. 198604032015041002
 (Dosen Penguji II)



Malang, 3 November 2017
 Ketua
 Jurusan Ilmu Ekonomi,

 Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D.
 NIP. 19620315 198701 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Strategi Pengendalian Internal Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar Kota Pasuruan)

Yang disusun oleh :

Nama : Adie Susilo
NIM : 135020400111036
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,

Dr. Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.
NIP. 19520315 198701 1 001

Malang, 2 Oktober 2017
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,


Dr. Asfi Manzilati, SE., ME.
NIP. 196809111991032003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Adie Susilo
 Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 20 Juli 1994
 NIM : 135020400111036
 Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
 Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan
 Alamat : Jl. Kendalsari Barat 1 No 2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :
**Strategi Pengendalian Internal Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat
 Indonesia Tbk (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar Kota
 Pasuruan)**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat
 atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
 menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar
 kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing,



Dr. Asti Manzilati, SE., ME.
 NIP. 196809111991032003

Malang, 2 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,



6000
 Adie Susilo
 NIM. 135020400111036

Mengetahui,
 Ketua
 Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.
 NIP. 19620315 198701 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	: Adie Susilo
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasuruan, 20 Juli 1994
Jenis Kelamin	: Laki- Laki
Agama	: Islam
Asal	: Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur
Anak Ke	: Pertama dari dua bersaudara
Alamat	: Dsn. Sobo RT 01 RW 06 Ds. Wonokoyo Kec. Beji
E-mail	: Adiesusilo17@gmail.com



B. DATA ORANG TUA

a. Ayah

Nama	: Soleh
Pekerjaan	: Wiraswasta

b. Ibu

Nama	: Suliyah
Pekerjaan	: Wiraswasta

C. PENDIDIKAN FORMAL

- TK Dharma Wanita Persatuan 12 Wonokoyo (1999-2001)
- SDN Sumbersari 1 (2001-2007)
- MTs Negeri Pandaan (2007-2010)
- MAN Bangil (2010-2013)
- Universitas Brawijayan Jurusan Ilmu Ekonomi (2013-2017)

MOTTO:

SEGALA PERLAKUAN PASTI DILIHAT OLEH ALLAH S.W.T

RIDHO ORANG TUA ADALAH RIDHO ALLAH S.W.T

**JADILIAH MANUSIA YANG BERMANFAAT BAGI ORANG DISEKITAR
KITA**

KEBAHAGIAAN TERGANTUNG PADA DIRI SENDIRI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Allahu Akbar!!!. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk menyelesaikan atau memenuhi gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dengan judul” Strategi Pengendalian Internal Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk(Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur). Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini adalah murni kesalahan penulis, karena manusia tidak terlepas dari kesalahan.

Terimakasih tidak akan terlepas penulis ucapkan kepada semua pihak yang membantu, membimbing serta memberi dukungan penulis ketika selama masa kuliah sampai dengan menulis skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Allah S.W.T Tuhan Semesta Alam, telah diberikan hidup dan nikmat yang tiada batasnya.
2. Nabi Muhammad SAW Rosulallah sosok teladan sehingga tingkah dan perilakunya mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih sabar dalam menghadapi ujian.
3. Orang Tua yang selalu memberikan dukungan doa maupun materi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan telah ikhlas merawat sejak penulis baru lahir.
4. Ibu Dr. Asfi Manzilati, SE., ME selaku pembimbing yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, masukan dan semangatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
5. Ibu dan Bapak dosen yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa kuliah serta bapak dan Ibu staf Ilmu ekonomi yang membantu administrasi selama masa kuliah.

6. Bu yayuk selaku kepala unit BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan dan para karyawan (Mas Erik, Mas Doni, Mas Yahya, Mas Safril, Mbak lin, Mas Rizal, Mbak Elin) telah meberikan tempat untuk melakukan penelitian. Terima kasih banyak untuk pengalamannya.
7. Semua kolega Ilmu Ekonomi, khususnya konsentrasi Ekonomi Keuangan Perbankan, khususnya lagi (Pe, Ihsan, Emil, Rifqi, Adam, Rizky Genji, Faris, Ciko, Rendi, Ilham, Eko, Fadlian, Raisa, Yuslim dan Lukman) terima kasih sudah membantu selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini, terutamanya memberikan tumpangan tidur selama di Malang saat sudah tidak kos lagi.
8. Anggi Diah Pitaloka sudah membantu memberikan nasehat, semangat dan bantuannya menyelsaikan Skripsi penulis.
9. Keluarga cemara (Bakhul, Yusuf, Fahmi, Dani, Faris dan Riqki) untuk tempat berkumpul dan saling tukar pikiran telah memberikan keamanan dan kenyamanan selama mengontrak rumah pada masa kuliah.
10. Keluarga dan teman-teman semua atas kebersamaan yang telah memberikan bantuan berarti bagi penulis.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu menyelsaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan amal soleh yang berlipat ganda pada semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan tidak mengulai kesalahan yang sama. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat khususnya bagi pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Malang, 3 November 2017

Adie Susilo, S.E.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Pengendalian Internal	11
2.2. Proses Pengendalian Internal terhadap Kredit	13
2.3. Penyelesaian Kredit Bermasalah	22
2.4. Penelitian Terdahulu	26
2.5. Posisi Penelitian	30
2.6. Kerangka Pikir.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Unit Analisis dan Penentuan Informan	33
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4. Metode Analisis Data	35
3.5. Uji Validitas Data	36
 BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Proses Pengendalian Internal Terhadap (KUR) di BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan.	38
4.2. Penyelesaian Kredit Bermasalah di BRI.....	51
4.3. Analisis Sistem Pengendalian Internal Kredit Usaha Rakyat	58
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA	 xiii
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: NPL KUR Bank-Bank Besar Indonesia	7
Tabel 2.1: Penelitian terhadulu	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Realisasi KUR 2016	3
Gambar 2.1: Kerangka Pikir	31
Gambar 3.1: Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>).....	35
Gambar 4.1: Data Nasabah	39
Gambar 4.2: Proses Pengajuan Kredit Calon Nasabah KUR	40
Gambar 4.3: Proses analisis Kredit oleh Mantri Kepada Calon Nasabah	41
Gambar 4.4: Proses Survei ke Calon Nasabah KUR	42
Gambar 4.5: Proses Analisis Agunan.....	45
Gambar 4.6: Proses Monitoring atau Pengawasan kepada Nasabah KUR	50
Gambar 4.7: Proses Pembinaan Nasabah Kredit Bermasalah	55

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian internal dalam penyaluran dan penagihan kredit usaha rakyat (KUR), mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit, untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kredit bermasalah dan untuk mengetahui prosedur pengawasan kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan oleh bank Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi langsung terhadap bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian di bank BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan sudah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan bank. Sehingga berpengaruh positif terhadap pemberian KUR dan cara mengatasi kredit bermasalah. akan tetapi, masih ditemukan pegawai bank yang menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan bank.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Kredit Usaha Rakyat (KUR)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang masih berkembang dan melakukan pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Pada dasarnya, fundamental ekonomi di Indonesia masih belum kokoh. Di sisi lain, pembangunan ekonomi sangat diperlukan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan disektor usaha-usaha yang didirikan oleh masyarakat kecil yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk itu, pemerintah mendorong terus memperdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam sektor UMKM ini mampu untuk menyerap tenaga yang banyak sehingga dapat menimalkan tingkat pengangguran di masyarakat sekitar. Dan jika pengangguran di masyarakat menurun maka juga akan menimalisir tingkat kemiskinan di masyarakat. Dalam hal ini UMKM juga akan mendapatkan peluang untuk memperlebar daya saingnya terhadap perusahaan yang cenderung menggunakan modal yang besar. Keberadaan UMKM tidak dapat di pungkiri mampu bertahan dan mampu menjadi penggerak roda perekonomian ekonomi Indonesia. Pada saat krisis ekonomi, UMKM mampu bertahan dan menjadi penopang perekonomian di Indonesia

Disisi lain, permasalahan yang begitu banyak yang di hadapi oleh UMKM sehingga sulit berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar dan bermodal lebih besar daripada UMKM. Masalah modal menjadi kendala utama untuk memajukan UMKM itu sendiri. dimana untuk meningkatkan permodalan dari UMKM diperlukan lembaga yang menyediakan fasilitas kredit. Karena dengan

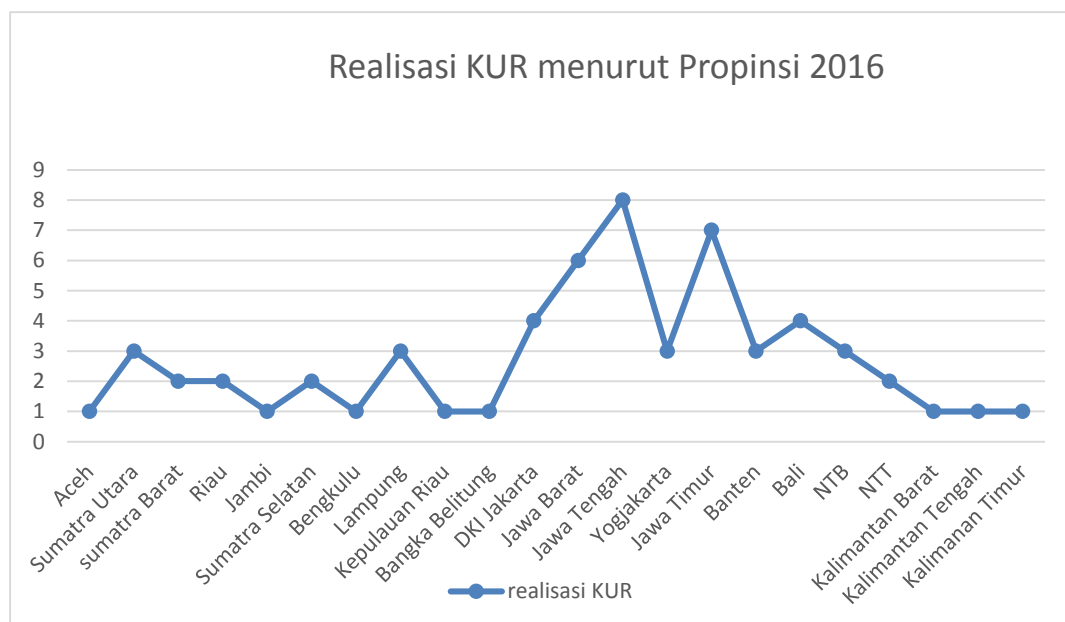
adanya fasilitas kredit, modal usaha UMKM akan tercukupi dan. mampu mengembangkan usahanya dengan meminjam dana dari lembaga pemberi fasilitas kredit tersebut. Salah satu lembaga penyedia fasilitas kredit yang dipercaya adalah perbankan.

Perbankan mempunyai peranan menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam Undang – Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk –bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsi intermediasi sering kali terjadi keadaan yang tidak optimal dalam artian debitur mengeluh sulitnya mengakses kredit dan sebaliknya bank mengeluh sulitnya menyalurkan kredit, biaya transaksi dan timbulnya risiko bank. Dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank itu sendiri, tetapi merupakan dana – dana masyarakat yang disimpan pada bank, yang kemudian diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit.

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) dan kredit dengan agunan (*Secured Loan*). Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun beberapa tahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Lain hal lagi, kredit dengan agunan, yaitu kredit yang dilakukan dengan menyertakan agunan seperti apa yang telah diperjanjikan. Agunan yang disertakan bisa berupa agunan barang, agunan pribadi (*borgtocht*) dan agunan efek-efek saham. pemerintah

merealisasikan upaya peningkatan kontribusi UMKM terhadap perekonomian adalah melalui pembiayaan modal usaha yang dinamakan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit usaha rakyat merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah, khususnya nasabah yang akan menciptakan usaha atau nasabah yang ingin mengembangkan usahanya tanpa menyerahkan anggunan kepada pihak peminjam dengan tingkat suku bunga yang relative kecil yaitu sebesar 9% dari total dana yang dipinjam. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Berikut adalah realisasi KUR di beberapa propinsi di Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan Penyaluran:

Gambar 1.1: Realisasi KUR 2016



Sumber: kur.ekon.go.id. 2016

Berdasarkan data diatas, realisasi KUR di pulau jawa menunjukan yang paling tinggi dari pada propinsi-propinsi yang berada di pulau besar seperti Kalimantan dan Sumatra. Jawa timur sebagai salah satu pusat UMKM yang cukup besar

sehingga realisasi KUR cukup tinggi dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia.

Kebanyakan pengusaha sedang terbentur modal untuk menjalankan bisnis, maka Kredit Usaha Rakyat bisa menjadi solusi yang tepat mengingat adanya beberapa keuntungan yang ditawarkannya. Selain Bank BRI, ada beberapa bank lainnya yang juga turut melaksanakan program dari pemerintah namun tingginya ketertarikan masyarakat untuk mengajukan kredit mikro di Bank BRI adalah karena bank BRI salah satu bank yang unitnya banyak dan memasuki daerah-daerah terpencil yang bank lain tidak ada. Kemudian suku bunganya yang relatif kecil Untuk tahun 2016 Bank BRI diketahui menawarkan layanan pinjaman mikro dengan suku bunga yang hanya 1.025% flat/bulan dan angka ini dianggap cukup meringankan nasabah. Bukan hanya itu saja, nasabah juga akan memperoleh cashback untuk setiap 6 bulan jika tepat waktu dalam melakukan pembayaran kredit sesuai dengan jangka waktu kredit.

KUR sendiri merupakan salah satu jenis dari daftar pinjaman bank BRI yang ditawarkan kepada masyarakat yang ingin meminjam sejumlah dana untuk keperluan mengembangkan jenis usaha mikro yang sedang berjalan. Pihak bank turut melengkapi jenis pinjaman mikro ini dengan asuransi kesehatan, jiwa, kecelakaan bahkan meninggal dunia yang bisa didapatkan secara gratis yang artinya Anda tidak diharuskan untuk membayar premi bulanan. Secara umum pinjaman ini bisa digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha di bidang perkebunan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Pinjaman mikro BRI tersedia dalam beberapa nominal pinjaman yaitu mulai dari 25 juta sampai 100 juta. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkannya, tidak mengherankan jika pinjaman mikro Bank BRI begitu diminati masyarakat. Program KUR BRI 2017

masih dibuka untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha UMKM yang berkeinginan mengajukan pinjaman dengan bunga ringan. Menariknya lagi program kredit mikro dari pemerintah ini mendapatkan subsidi suku bunga bahkan ditahun 2017 ini suku bunga yang sebelumnya sebesar 9% rencananya akan diturunkan jadi 7% tapi tidak jadi. Seiring perkembangan waktu program kredit usaha rakyat menjadi primadona bagi masyarakat dalam mengajukan pinjaman tunai sebagai modal pengembangan usaha. Selain suku bunga ringan program ini juga diberikan dengan proses dan syarat pengajuan mudah. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Pasar Besar Kota Pasuruan melakukan pengolahan dana dari masyarakat melalui simpanan nasabah berupa tabungan dan deposito untuk disalurkan ke nasabah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) kepada pengusaha-pengusaha kecil yang kekurangan dana. BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan dalam melaksanakan penyaluran kredit sudah menjalankan misinya, peminat pengusaha-pengusaha kecil di sekitar bank untuk meminjam dana dari bank tersebut cukup banyak diminati. Karena letak lokasi sangat strategis yaitu daerah pasar sehingga banyak pedagang-pedagang dari pasar yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dipermudahkan dengan persyaratan yang sangat mudah, prosedur yang sederhana dan pencairannya cepat.

Pada pelaksanaan KUR ini, supaya kredit yang diberikan tersebut lancar maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada debitur, dimana sebelum kredit di berikan maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman. Oleh sebab itu bank harus bisa menetapkan prosedur pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang timbul, karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu

sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

KUR ini tidak berjalan dengan apa yang diharapkan pemerintah. Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) banyak kendala untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang adanya KUR. Terutama masalah tidak konsistennya debitur untuk membayar angsuran kredit tersebut. Sehingga banyak debitur yang mengalami kredit macet. Berbagai faktor yang menyebabkan debitur mengalami kendala saat mengembalikan kredit perbankan. Sehingga tidak sedikit debitur masuk sebagai daftar NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit macet. NPL (*Non Performing Loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. NPL (*Non Performing Loan*) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian-kerugian akibat kegagalan pembayaran oleh peminjam (debitur), atau terjadinya kemerosotan kualitas kemampuan membayar hutang pihak debitur (Wawan H. Purwanto, 2011). NPL (*Non Performing Loan*) merupakan salah satu kunci untuk menilai suatu kualitas dari kinerja suatu bank. Oleh karena itu NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana apabila tidak segera ditindaklanjuti maka akan berdampak bahaya pada bank. Bagaimana tidak, apabila tidak segera ditangani maka jumlah modal pada bank akan semakin berkurang. Jika NPL tersebut masih berlanjut dan makin parah maka akan diumumkan daftar hitam oleh perbankan. Berikut ini NPL Bank-Bank besar yang ada di Indonesia:

Tabel 1.1: NPL KUR Bank-Bank Besar Indonesia

Tahun	BNI	BRI	BTN	MANDIRI	BCA	Bank JATIM	Bank JABAR
2009		3.92					
2009		3.52					
2010	4.67	4.10	4.00	2.43			
2010	4.30	4.27	4.12	2.33			
2010	4.37	4.28	4.22	2.39			
2010	4.28	2.78	3.26	2.21			
2011	4.09	3.05	4.04	2.43			
2011	4.03	3.64	4.35	2.22			
2011	3.83	3.34	4.18	2.41			
2011	3.61	2.30	2.75	2.18			
2012	3.58	2.73	3.22	2.18	2.70		
2012	3.44	2.38	3.46	1.95	3.45		
2012	3.39	2.33	3.68	1.91	3.44	3.08	2.7
2012	2.84	1.78	4.09	1.74	3.59	3.34	2.46
2013	2.79	1.97	4.77	1.90	3.03	3.86	2.99
2013	2.55	1.81	4.63	1.77	3.42	3.63	2.82
2013	2.44	1.77	4.88	1.71	3.66	3.82	2.73
2013	2.17	1.55	4.05	1.60	3.84	3.82	2.61
2014	2.32	1.78	4.74	1.76	3.46	4.87	2.36
2014	2.19	1.97	5.01	1.77	3.78	4.07	1.7
2014	2.23	1.89	4.85	1.68	3.86	3.65	1.69
2014	1.96	1.69	4.01	1.66	3.86	3.52	1.92
2015	2.14	2.17	4.78	1.81	3.48	3.38	2.53
2015	2.98	2.33	4.70	2.00	3.75	3.25	1.77
2015	2.83	2.24	4.50	2.41	3.86	2.8	1.79
2015	2.70	2.02	3.42	2.29	3.84	2.67	2.04

Sumber: www.ojk.id diolah. 2017.

Pada tabel diatas, menunjukan bahwa NPL atas kredit bank tersebut mengalami fluktuasi. Semakin besar persentase NPL maka semakin buruk keadaan bank tersebut dan jumlah kredit macet cukup besar dan meningkatkan resiko bank tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, jika persentase semakin NPL semakin kecil maka semakin baik keadaan bank tersebut dan jumlah kredit macet semakin sedikit. Pada tabel tersebut bank BRI jumlah NPL paling kecil daripada bank-bank lain pada tahun. Salah satu

penyebab dari adanya NPL adalah kurangnya pengendalian internal KUR di bank. Untuk mengetahui mengapa NPL di BRI lebih rendah daripada bank-bank lain, penulis akan melakukan penelitian dari sisi pengendalian Internal terhadap kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia. Dengan adanya pengendalian internal dalam bidang perkreditan di BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan diharapkan dapat mengurangi NPL. Dan diharapkan dapat juga mencegah penyalagunaan kredit, kecurangan nasabah ataupun penyelewengan dalam pengembalian kredit dan pelunasannya. mengingat bahwa timbulnya kegagalan kredit dapat disebabkan karena kurang maksimalnya atau kurangnya pengawasan terhadap pengendalian internal yang sudah dibuat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul.” **STRATEGI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK ” (Sample Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur)**. Penulis berusaha meneliti dan mengetahui sistem pengendalian internal atas penyaluran kredit dan pengembalian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Pasuruan merupakan salah satu daerah industri yang memiliki banyak pabrik besar. Kebanyakan masyarakat Pasuruan bekerja di pabrik, namun usaha mikro kecil menengah juga banyak berdiri di daerah Pasuruan. UMKM inilah yang menjadi fokus dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Banyak warga yang diuntungkan dari adanya KUR ini namun ada juga risiko yang

akan berdampak dari adanya KUR, terutama kerugian pada perbankan ketika kredit yang disalurkan tidak bisa dikembalikan oleh pihak peminjam yang mengakibatkan kredit macet. Dan untuk mengetahui mengapa BRI NPL KUR lebih rendah daripada bank-bank lain melalui sisi pengendalian internal KUR itu sendiri. Berdasarkan ilustrasi tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak sistem pengendalian internal atas pengelolaan kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur?
2. Bagaimana cara mengatasi kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Memahami dan menganalisis pengendalian internal atas pengelolaan kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur.
2. Memahami cara mengatasi kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan memeberikan manfaat bagi beberapa pihak yang terlibat. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penulis

- a. Memberikan gambaran mengenai penerapan pengendalian internal atas pemberian kredit dan pengembalian kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Besar, Pasuruan – Jawa Timur.
- b. Dapat meningkatkan ilmu dan wawasan tentang pengendalian internal atas pemberian kredit dan pengembalian kredit dan meningkatkan penulis dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi.

2. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai bahan pertimbangan jika akan melakukan penyaluran dana kredit sehingga tidak menyebabkan kredit macet.
- b. Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah yang mungkin dihadapi serta dipakai sebagai informasi dan saran perbaikan supaya lebih baik kedepannya.

3. Peneliti selanjutnya

- a. Sebagai acuan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang sejenis

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha. Menurut Jusup (2001:252) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan laporan keuangan: Manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan untuk investor, kreditor dan para pemakai lainnya baik secara hukum maupun profesionalnya untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Efektivitas dan efisiensi operasi: Pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan alat untuk mengurangi kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu serta mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Bagian penting lain dari efektivitas dan efisiensi adalah penggunaan aktiva dan catatan fisik perusahaan yang dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak apabila tidak dilindungi oleh pengendalian yang memadai. Kondisi yang sama juga berlaku untuk aktiva non fisik seperti piutang usaha, dokumen-dokumen.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku: Dalam akuntansi tidak semua hukum dan undang-undang berhubungan dengan akuntansi, hukum dan peraturan yang tidak berhubungan dengan akuntansi yaitu perlindungan terhadap lingkungan. Sedangkan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan akuntansi yaitu peraturan tentang perpajakan.

Menurut Mulyadi (2002: 183) Sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Menurut Warren, Reeve, & Fees (1999: 183) dalam Munawaroh (2011) pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.

Menurut Krismiaji (2002:218), penendalian intern adalah rencana dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Marshall dan Paul (2004:229) menyatakan bahwa, pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan, pengendalian internal adalah pengukuran potensi penerapan pengendalian internal yang meliputi organisasi perusahaan serta semua kebijakan-kebijakan yang ada dengan membandingkan hasil yang sesungguhnya dicapai, dengan tolak ukur atau standarisasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya dengan tujuan mengamankan harta perusahaan dan untuk memperoleh data-data akuntansi yang benar dan dapat dipercaya serta dipatuhinya peraturan yang telah digariskan oleh perusahaan.

Dari definisi diatas, untuk lebih jelasnya penulis mencoba menjelaskan satu persatu sebagai berikut:

- a. Menjaga aset: aset perusahaan perlu dijaga dari segala bentuk kemungkinan yang akan dapat merugikan perusahaan, seperti penyewengan, pencurian, kecurangan dan lain-lain, baik secara administrasi maupun fisik.
- b. Memberikan informasi yang akurat dan andal: informasi yang keluar dari catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan yang berisi informasi akuntansi kuangan dan lain-lain harus dapat dipercaya, tidak menyesatkan dan dapat diuji kebenarannya.
- c. Mendorong dan memperbaiki efisiensi: dengan digunakan berbagai metode dan prosedur untuk mengendalikan biaya maka diperlukannya penyusunan anggaran biaya-biaya standar yang dapat menjadi suatu alat untuk mengendalikan biaya-biaya yang keluar dengan manfaat yang diperoleh dari hasil pengeluaran biaya tersebut dengan tujuan akhir untuk mencapai efisiensi operasional perusahaan.
- d. Mendorong kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan: tujuan yang telah ditetapkan adalah landasan dasar dari aktivitas-aktivitas perusahaan. Bila terdapat aktivitas perusahaan yang menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka bisa cepat diketahui karena tidak sesuai dengan prosedur sistem yang ada dan harus dijalankan oleh setiap karyawan.

2.2 Proses Pengendalian Internal terhadap Kredit

Pengendalian Kredit sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Pengendalian kredit menurut Hasibuan (2011), adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif berarti

kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak. Hal ini penting dilakukan karena terjadinya kredit macet membawa kerugian bagi pihak bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. Terdapat dua jenis pengendalian kredit yakni *preventive control of credit* yang merupakan pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet dan *repressive control of credit* yang merupakan tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring, dan liquidation. Proses pengendalian kredit terdiri dari pengecekan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, pengendalian setelah kredit diberikan dan penyelesaian kredit macet.

1. Inisiasi Kredit

Pada tahap inisiasi kredit, bank menerima permohonan nasabah atau memberikan penawaran kredit kepada nasabah. Sesuai dengan ketentuan Bank Inonesia, dalam menilai permohonan kredit, bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Seperti permohonan kredit yang diajukan nasabah memiliki beberapa tujuan, seperti permohonan kredit baru, permohonan tambahan kredit yang telah berjalanan lainnya. Dari sekian kegiatan perbankan, salah satunya adalah membuat perencanaan kredit. Dalam proses perencanaan kredit merupakan awal dari manajemen perkreditan, dimana tujuan, strategi, sasaran, dan program penelitian perkreditan ditentukan melalui perencanaan. Melalui perencanaan, dapat dievaluasi apakah suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Semakin kompleks suatu kegiatan usaha yang akan dilakukan, semakin rencana kerja yang harus disusun pun semakin kompleks pula sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha. Di bidang perkreditan

diperlukan juga perencanaan kredit mengingat dana yang disalurkan untuk kredit bersumber dari dana pinjaman masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan.

Perencanaan kredit dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan bagaimana pelaksanaan pemberian kredit harus dilakukan di waktu yang akan datang agar tujuan pemberian kredit yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk menentukan tujuan dan bagaimana agar tujuan tersebut tercapai, perencanaan harus tersusun secermat mungkin dengan memperhitungkan segala faktor yang memengaruhi dan menentukan. Perencanaan yang disusun secara cermat dan baik memiliki ciri-ciri, antara lain bersifat objektif, jelas dan praktis serta mempermudah tercapainya suatu tujuan, bersifat fleksibel dan disusun secara rinci. Perencanaan kredit juga tidak terlepas dari manajemen risiko kredit secara keseluruhan. Sasaran manajemen risiko kredit meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian kredit secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan serta dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko dari pemberian kredit melalui pengelolaan portofolio kredit dan penetapan kebijakan, sistem serta prosedur yang tepat.

2. Analisis Kredit

Nota analisis disusun agar pengambil keputusan dapat memutuskan dengan tepat apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak. Dalam analisis, kredit pada intinya terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang berisi analisis beberapa aspek, antara lain *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral*. Analisis 5C adalah salah satu prinsip yang biasa digunakan bank dalam memilih calon nasabah/debitur yang layak diberikan pinjaman kredit. Analisis 5C terdiri dari aspek *character, capacity, capital, condition*

of economic, dan *collateral* yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Character. Penilaian karakter calon nasabah dilakukan untuk dapat menyimpulkan bahwa nasabah tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian karakter biasanya dilakukan melalui Bank checking. Bank checking ini melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah antara lain, informasi mengenai bank pemberi kredit, nilai fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran kredit serta informasi lain yang terkait tentang kredit tersebut. Trade checking
2. Capacity. Penilaian kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen nasabah dilakukan agar bank yakin bahwa usahanya yang diberikan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.
3. Capital. Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah yang bersangkutan.
4. Condition of economy. Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri baik dimasa lalu maupun masa yang akan datang dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis condition of economy antara lain, regulai pemerintah pusat dan daerah, kondisi makro dan mikro ekonomi, situasi politik dan keamanan, kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

5. Collateral. Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah dilakukan untuk mengetahui kecukupan agunan yang sesuai dengan pemberian kredit. Agunan yang diserahkan nasabah dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban.

3. Analisis Agunan

Dalam melakukan analisis agunan, agar diperlihatkan bahwa suatu barang yang dapat dijadikan sebagai agunan kredit harus memenuhi kriteria, sebagai berikut, mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang atau dapat ditukarkan dengan uang, dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain dan agunan tidak boleh tanah waqof, mempunyai nilai yudiris dalam arti dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga kreditur memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil likuidasi barang tersebut. Agunan dapat berupa benda bergerak seperti piutang, persediaan, mesin-mesin pabrik, kendaraan bermotor, saham maupun benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lain-lain. Agunan merupakan jalan yang kedua yang diserahkan debitur untuk mencukupi pelunasan kewajiban debitur dalam hal tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut. Untuk pengamanan apabila agunan yang diserahkan bersifat dapat diansuransikan maka wajib diansuransikan terkait dengan kecukupan agunan maupun jenis barang yang dapat dijadikan agunan, dapat berpedoman pada ketentuan bank. Tujuan dari penguasaan agunan adalah sebagai faktor pengurang risiko kredit jika fasilitas kredit yang diberikan macet dan bentuk keseriusan calon debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, terutama mengenai pembayaran kembali pelunasan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui.

4. Penetapan Jumlah Kredit Dan Struktur Pembiayaan

Jumlah kredit yang akan diberikan pada dasarnya disesuaikan kebutuhan calon debitur demikian halnya dengan jenis kreditnya bukan hanya sekedar menturuti berapa besar jumlah kredit yang dimohon oleh calon debitur. Evaluasi terhadap struktur pembiayaan yang diperlukan perlu dibicarakan dengan calon debitur dengan baik. Jumlah dan struktur pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan calon debitur pada akhirnya akan menimbulkan risiko kredit. Dalam menetapkan jumlah pembiayaan wajib memperhatikan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik yang diatur secara eksternal maupun internal bank.

1. Perhitungan Kebutuhan Kredit

Pentingnya melakukan perhitungan kebutuhan kredit hal ini kadang banyak ditemui debitur/nasabah sering kali mengajukan kredit dengan jumlah tertentu tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Dan tidak jarang pula bank menolak memberikan jumlah yang diminta lebih dari kebutuhan debitur. Terkadang tidak jarang juga bank menawarkan kepada nasabah untuk menambah jumlah kredit di atas jumlah yang diminta. Hal ini disebabkan jumlah yang dibutuhkan masih kurang yang diminta. Oleh karena itu persetujuan suatu kredit termasuk jumlah kredit yang dibutuhkan ditentukan perbankan. Sehubungan dengan ada hal tersebut maka bank memerlukan perhitungan kredit sehingga mengetahui kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya sesungguhnya. Untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya, dapat dilakukan dengan berbagai cara dan secara umum, antara lain sebagai berikut:

a) Berdasarkan Nilai Jaminan

Cara ini biasanya dilakukan untuk jenis kredit konsumtif. Pemberian kredit yang diberikan bank kepada calon debitur jumlahnya sesuai dengan nilai aguna/jaminan

yang di berikan oleh calon debitur. Misalnya agunan/jaminan berupa motor maka jumlah kredit sesuai dengan harga pasaran motor tersebut tergantung dengan kondisi kendaraan tersebut. Bank dapat menghitung nilai wajar dari jaminan tersebut kemudian ditentukan besarnya kredit sesuai dengan ketentuan bank.

b) Berdasarkan Penghasilan nasabah (gaji)

Dengan cara ini biasanya dilakukan dalam pemberian kredit khusus bagi karyawan perusahaan. Dalam pemberian kredit kepada karyawan yang dinilai dari perhitungan angsuran yang menjadi beban nasabah. Misalnya angsuran yang dibebankan tidak boleh lebih dari 30% dari gaji nasabah per bulan, namun besarnya tergantung dari kebijakan bank yang bersangkutan.

c) Berdasarkan Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Nasabah Untuk Pembiayaan Usaha

Cara ini dilakukan untuk menganalisis kredit yang sumber pendanaannya dari bank dan nasabah. Bank akan menghitung kebutuhan kredit dan menentukan berapa yang akan dibiayai oleh nasabah dan berapa yang dibiayai oleh bank. Hal ini penting agar nasabah juga merasa tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Nasabah juga akan termotivasi karena ada uang yang ikut tertanam dalam kegiatan serta mengembalikan modal bank.

d) Berdasarkan Studi Kelayakan

Kredit ini biasanya yang bersifat produktif/komersial. Dengan cara ini bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya. Penilaian dilakukan dari sisi aspek manajemen, keuangan produksi dan lainnya. Misalnya untuk mendirikan pabrik, dibutuhkan bahan, bahan bangunan, tenaga kerja dan lainnya untuk kebutuhan modal kerja.

5. Persetujuan kredit

Berdasarkan analisis- analisis yang dilakukan sebelumnya, pemegang kewenangan memutuskan kredit akan memberikan keputusan untuk menyetujui

atau menolak proposal yang diajukan oleh calon nasabah. Pemegang kewenangan dapat individu atau komite kredit.

1. Kewenangan individu. Sesuai dengan pedoman kredit yang telah disusun bank maka seorang pejabat kredit dapat diberikan kewenangan memutus kredit dengan persyaratan tertentu.

2. Komite kredit melakukan review dan menyetujui kredit dengan limit kewenangan. Komite kredit bertanggung jawab atas kredit yang diputus.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya komite kredit pada kantor pusat bank yang merupakan komite operasional yang membantu direksi dalam mengevaluasi dan memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan direksi.

6. Pencairan Kredit

Salah satu dokumen penting dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang baik adalah perjanjian yang menempatkan bank dan nasabah dalam posisi yang seimbang serta menggambarkan kepentingan kedua belah pihak terhadap perjanjian kredit yang dibuat. apabila disusun dengan baik dan kinerja yang diharapkan dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka perjanjian kredit merupakan ketentuan yang bersifat administrative dan bukan merupakan faktor dalam pelunasan kredit. Sebagian besar perjanjian kredit dibuat sesuai dengan situasi pemberian kredit sehingga syarat dan ketentuan masing-masing perjanjian kredit bervariasi. Bank yang memahami kekuatan dan kelemahan nasabah, melindungi kepentingan bank dari kelemahan nasabah.

Pencairan kredit dilakukan setelah ditandatanganinya perjanjian antara bank dan debitur. Kredit hanya dapat dicairkan setelah seluruh persyaratan kredit yang ditetapkan komite kredit dan dokumen-dokumen perkreditan yang dibutuhkan serta kewajiban-kewajiban debitur telah dipenuhi. Proses pencairan ini dilaksanakan oleh petugas yang berbeda dengan yang memasarkan kredit.

Dalam hal persyaratan, dokumentasi dan kewajiban debitur belum terpenuhi maka pencairan kredit hanya dapat dilakukan dengan persetujuan komite kredit yang menyetujui kredit tersebut.

Penarikan kredit harus didasarkan pada surat permohonan penarikan kredit yang ditandatangani oleh pejabat debitur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan debitur sesuai anggaran dasar perusahaan yang berlaku. Mekanisme penarikan kredit tersebut dapat dilakukan dengan cek, bulyet giro, surat permohonan penarikan kredit atau bukti penarikan oleh debitur.

7. Monitoring Kredit

Kredit yang telah ditarik oleh nasabah harus dimonitor oleh pihak bank secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi oleh nasabah dan bank. Monitoring kredit dilakukan secara individual debitur. Monitoring ketat dilakukan agar bank dapat mengetahui lebih dini apabila terdapat tanda-tanda penurunan kualitas/kondisi keuangan/ performance perusahaan yang dapat berdampak pada kualitas kredit yang diberikan. Melalui tanda-tanda tersebut, bank dapat mengambil tindakan dini untuk mencegah kredit bermasalah atau dapat bertindak cepat untuk meminimalkan kerugian bank. Penurunan kualitas kredit tidak terjadi dalam semalam namun melalui beberapa tanda. Beberapa tanda yang dapat menindikasikan terjadinya masalah pada nasabah, antara lain:

1. Laporan penjualan menurun dibandingkan periode-periode sebelumnya dan perputaran lambat.
2. Panggilan telepon dari bank tidak dijawab.
3. Penurunan tajam nominal rekening nasabah.

Untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah adalah dengan memperhatikan gejala-gejala yang terjadi dan tidak menunggu sampai nasabah tidak dapat

membayar kewajibannya terhadap bank. Masalah yang diketahui lebih awal memungkinkan bank melakukan komunikasi dengan nasabah dan melakukan tindak perbaikan sedini mungkin sebelum bank mengalami kerugian. Untuk mendeteksi kredit bermasalah sejak dini sejak awal, bank melakukan beberapa hal, sebagai berikut

1. Menganalisis laporan keuangan secara berkala dan menyeluruh
2. Menjaga komunikasi dengan nasabah, baik melalui telepon secara berkala, surat menyurat dan kunjungan ke nasabah.
3. Memahami tanda-tanda yang ditunjukkan pihak ketiga
4. Memonitor rekening nasabah di bank.

2.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan bahwa “kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat”. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit. Di dalam pedoman pemberian kredit, salah satu kebijakan yang perlu disusun adalah tentang pengolahan kredit bermasalah. secara prinsip, semua bank tidak menginginkan adanya kredit bermasalah. namun, sebagai salah satu kegiatan bisnis maka tidak ada bisnis yang tidak ada risikonya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun pedoman bagaimana bank harus mengelola kredit bermasalah yang ada.

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya (mahmoeddin. 2002)

Pada peraturan kreditur Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tentang restrukturisasi kredit, pasal 9 suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya. Suatu kredit dikatakan bermasalah dengan klarifikasi antara lain tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan bermasalah

2. Sebab Sebab Kredit Bermasalah

Kegiatan bank dalam penyaluran kredit kepada nasabah tidak selamanya kredit yang diberikan akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan oleh perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank dan nasabah. Kondisi lingkungan eksternal ataupun internal dari sisi bank maupun nasabah dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan gagal bayar. Dalam kondisi eksternal, perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan/peraturan yang mempengaruhi bidang usaha debitur. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha nasabah atau menyebabkan usaha nasabah sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya. Kemudian faktor geografis juga mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah, misalnya terjadi bencana alam yang mempengaruhi usaha nasabah.

Terlepas dari kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kredit bermasalah, kondisi internal juga sering terjadi dan menyebabkan kredit

bermasalah. kegagalan dari sisi debitur sering terjadi dalam memenuhi kewajiban kepada bank yang menyebabkan kredit bermasalah. sikap kooperatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan, kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank, konflik di internal perusahaan dan strategi usaha yang tidak tepat mempengaruhi timbulnya kredit bermasalah.

3. Pembinaan Kredit Bermasalah

Pembinaan kredit bermasalah merupakan upaya awal yang dilakukan bank terhadap nasabah kredit bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas kredit yang telah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembinaan kredit bermasalah antara lain:

1. Melakukan pendampingan kepada nasabah bermasalah. pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan kredit yang terjadi murni karena aktivitas usaha (risiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan nasabah terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya atau tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kredit. Apabila terkait dengan permasalahan aktivitas usaha, bank akan memberikan alternative atau memberikan masukan untuk membantu nasabah keluar dari masalah aktifitas usahanya.
2. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap nasabah bermasalah.

4. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelamatan kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap nasabah bermasalah untuk memperbaiki kinerja usaha nasabah yang bersangkutan dan kualitas kreditnya yang didasarkan atas analisis

bank, debitur tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalankannya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank sehingga dapat menjaga kepentingan bank melindungi bank dari potensi risiko yang lebih besar. Tindakan yang dapat dilakukan bank dalam penyelamatan kredit bermasalah antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) untuk kemudian di jadwalkan kembali pembayaran untuk di buat perjanjian *rescheduling* tersendiri
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Dalam *reconditioning* ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan. Syarat *reconditioning* perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lain sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum kredit.
3. Penataan kembali (*restructuring*) perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank , konversi seluruh atau sebagian

tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat di serta dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dapat dijadikan sebagai model perbandingan.

Tabel 2.1: Penelitian terdahulu

No	Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Annisa Handayani (2010)	<i>Sistem Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil Surabaya</i>	Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian internal. BNI memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang
2	Nita M. Sabi (2013)	<i>Pengaruh Sistem Pengendalian Itern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesi Cabang Limboto</i>	Hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit dengan arah positif
3	Retno Martanti E.L.dan	<i>Peran Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Dalam</i>	Sistem pengendalian internal pemberian kredit sangat berperan dalam

	Masruroh (2015)	<i>Meminimalisasi Non Performing Loan Pada Pt Bank Mitraniaga, Tbk</i>	meminimalisasi non performing loan pada PT Bank Mitraniaga, Tbk, hal ini berdasarkan hasil penelitian dari perhitungan tingkat korelasi sebesar 84,4%, dan koefisien determinasi sebesar 71,3% sedangkan sisanya dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti faktor eksternal, faktor internal nasabah, dan faktor kegagalan bisnis.
4	Oktaviana Linda Kumala Dewi	<i>Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kota Pati</i>	Struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional terhadap kualitas kredit dengan indikator NPL berpengaruh negatif. Sedangkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. sistem wewenang terhadap kualitas kredit 2. praktek yang sehat terhadap kualitas kredit 3. karyawan yang berkualitas terhadap kualitas kredit. Terdapat pengaruh secara simultan dan negatif antara efektivitas SPI dengan indikator struktur yang memisahkan tanggung jawab, sistem

			wewenang, praktek yang sehat, dan karyawan yang berkualitas terhadap kualitas kredit dengan indikator NPL.
5	Dewi Nilam Sari (2016)	Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Guna Meminimalisir Risiko Kredit Macet Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Artha Karya	<p>1. Pengendalian Internal yang diterapkan kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan:</p> <p>A. Pada aktivitas pengendalian di koperasi disebutkan bahwa tidak dilengkapinya sistem yang dapat mencegah tindakan penipuan terhadap aktivitas kredit yang dijalankan. Ini membuktikan bahwa pengendalian internal di koperasi ini tidak efektif. Karena dengan adanya pengendalian internal yang efektif dalam sistem pemberian kredit bisa mengurangi risiko adanya kredit bermasalah (Kanaka Puradiredja, 2007).</p> <p>B. Pada aktivitas pengendalian di koperasi disebutkan bahwa kredit yang sedang berjalan tidak mendapatkan perlindungan</p>

			asuransi. Sedangkan perlindungan asuransi itu sendiri sangat penting sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui secara dini.
6	Zuliano (2014)	Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. Sarana Sulsei Ventura	<p>1. Dalam komponen struktur pengendalian intern telah mengacu pada SA 319 Paragraph 07 secara umum. Akan tetapi, dalam proses pemberian kredit, unsur – unsur ini kurang diperhatikan sehingga banyak nilai kredit yang kurang tepat diberikan kepada CPPU yang akan dibiayai.</p> <p>2. Analisa kelayakan bisnis CPPU yang kurang tepat dalam proses penentuan kredit sangat sering terjadi. Hal ini merupakan faktor utama dari kenaikan kredit macet setiap tahunnya.</p> <p>3. Dalam proses penghapusan (write off) PPU bermasalah, bantuan manajemen tidak terlibat.</p>
7	Pramuris Prismawanti (2014)	Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Studi Pada Pt. Bank	Pemberian kredit dan pengendalian intern yang diterapkan PT. Bank

		Bukopin Tbk Cabang Surakarta	Bukopin Tbk Cabang Surakarta telah efektif, karena telah mencapai tujuan dari pengendalian intern pemberian kredit yaitu, keandalan pelaporan keuangan pemberian kredit, efektivitas dan efisiensi pemberian kredit, ketaatan terhadap hukum dan peraturan kredit.
--	--	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data diolah, 2017.

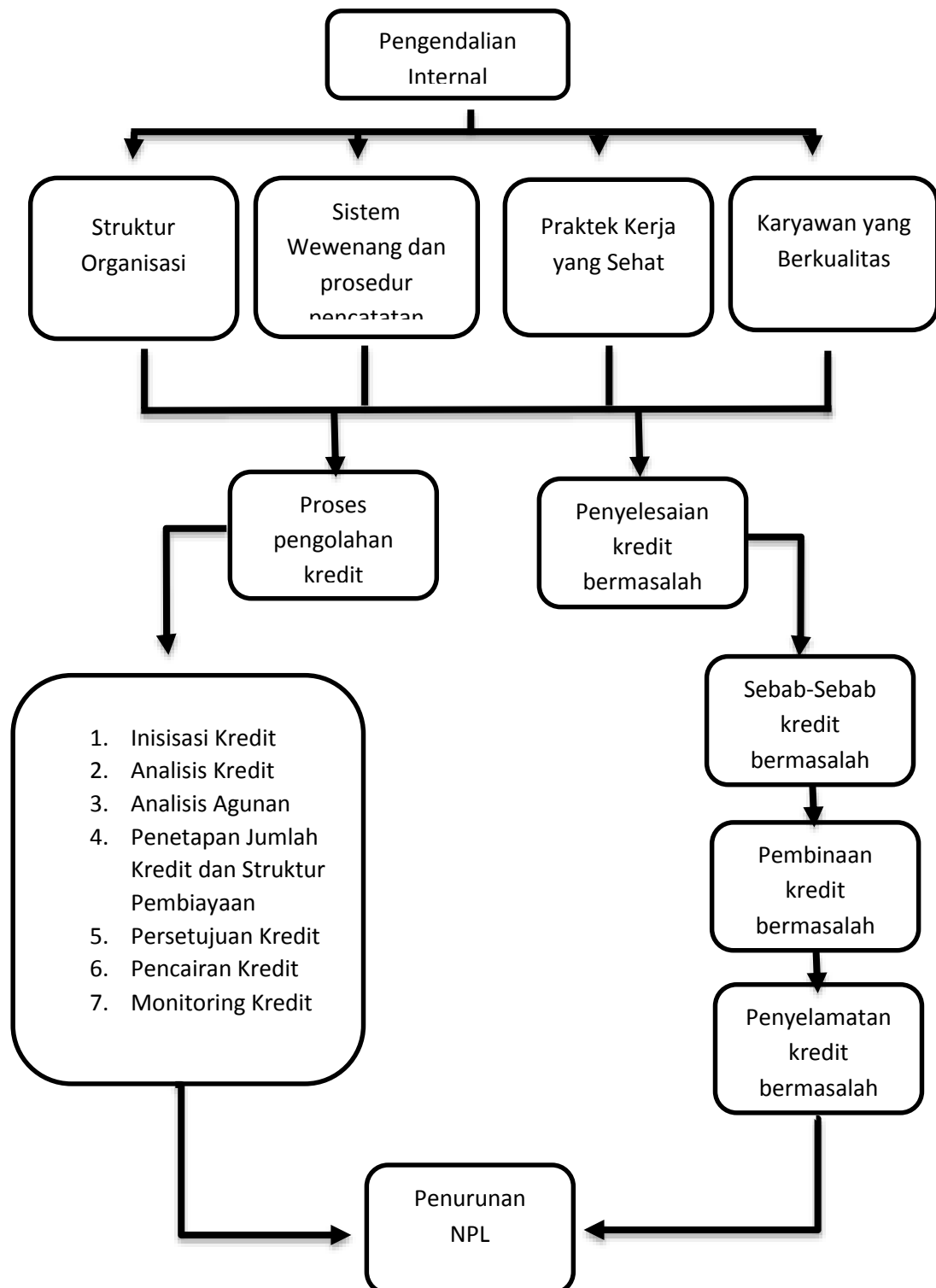
2.5 Posisi Penelitian

Posisi penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana cara pengendalian internal pengeolahan Kredit Usaha Rakyat dan bagaimana jika ada kredit bermasalah kemudian cara penyelesaiannya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu terletak di Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lokasi penelitian. Di penelitian yang terdahulu masih menggunakan kredit biasa, dan pada penelitian ini akan lebih spesifik di Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan penjabaran dari bab pendahuluan dan diikuti dengan panduan teori di atas penulis mencoba memberikan gambaran yang lebih muda dimengerti untuk mewakili seluruh penelitian ini sehingga pembaca mampu menangkap tujuan dan alur pemikiran dari penelitian ini. Berikut kerangka piker sederhana yang dapat dilihat memalui gambar berikut:

Gambar 2.1: Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada BAB III akan dibahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berikut adalah sub bab yang dapat diuraikan untuk membahas metode penelitian lebih spesifik, diantaranya:

3.1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengolahan kredit usaha rakyat dan penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Pasar Besar Kota Pasuruan Jawa Timur di Jl. Soekarno Hatta Kota Pasuruan secara mendalam. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan dihadapi dalam kegiatan tersebut. Kemudian pendekatan kualitatif mampu menjawab rumusan masalah secara lebih

mendalam, metode kualitatif dapat menjawab rumusan masalah berdasarkan fakta dan realitas di lapangan, meskipun dapat bertentangan dengan teori.

3.2. Unit Analisis dan Penentuan Informan

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan unit analisis pengendalian internal terhadap kredit usaha rakyat dan cara mengatasi kredit bermasalah. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data penelitian akan ditentukan beberapa informan. Informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam pengendalian internal atas kredit. Informan tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu informan kunci dan informan pendukung. Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan kunci: yang menjadi informan kunci adalah Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Pasar Besar Kota Pasuruan.
2. Informan pendukung: dalam memperoleh informasi terkait data penelitian terdapat informan pendukung yaitu Account Officer/mantra dan Teller PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Pasar Besar Kota Pasuruan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data kualitatif penulis akan menggunakan data primer dan sekunder. Dimana data primer dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berupa jurnal, internet, buku dan sumber yang lainnya yang mendukung penelitian ini.

1. Wawancara

Dengan menggunakan wawancara, penulis dapat mendapatkan data langsung dari narasumber sehingga data yang diperoleh lebih valid. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui

Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Esterberg 2002). Stainback dalam Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa: *interviewing provide the rearcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alon*. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan di observasi.

2. Observasi

Tujuan dilakukannya observasi untuk dapat mengamati secara langsung dan mencatat fenomena yang muncul dalam setting lokasi, objek, atau yang akan diteliti sehingga tidak ada manipulasi data. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Nasution dalam Sugiyono 2013). Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan melakukan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak (Sugiyono 2013). Dalam observasi penelitian ini lebih kepada mengamati bagaimana jalannya proses pengolahan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

3. Dokumentasi

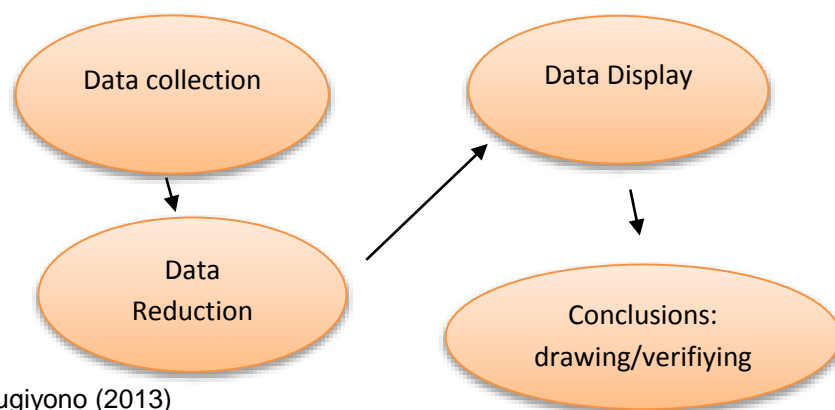
Menurut Sugiyono (2013) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya

catatan harian, sejarah kehidupan, certera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokmentasi yang berbentuk karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan dokumen dari bank, laporan tentang nasabah KUR, serta data-data yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini.

3.4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan analisis interaktif yaitu teknis analisis data yang terdiri dari data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing (penarikan dan pengujian kesimpulan) (Miles dan Hiberman dalam Sugiyono). Reduksi data merupakan proses dimana peneliti terlebih dahulu melakukan pengkajian data-data yang diperoleh, yaitu dengan melakukan pengujian terhadap data yang berkaitan dengan aspek atau fokus penelitian. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data yang berupa menampilkan tabel, grafik bagan, uraian singkat dan lain-lain. Setelah melakukan reduksi data dan display data langkah yang terkahir adalah verivikasi data atau penarikan kesimpulan.

Gambar 3.1: Komponen dalam analisis data (*interactive model*)



Sumber: Sugiyono (2013)

3.5. Uji Validitas Data

Menurut Sugiyono (2013) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Untuk menguji validitas data dari penelitian kualitatif akan dilakukan dengan cara menguji *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*. Berikut dapat diuraikan masing-masing cara uji validitas data:

1. Uji *Credibility* (kepercayaan)

Pada penelitian ini uji kredibilitas data yang diperoleh menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan cara untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan untuk memastikan data yang dihasilkan dianggap benar. Uji triangulasi dibagi menjadi beberapa cara sebagai berikut:

- a) **Triangulasi sumber** untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b) **Triangulasi teknik** untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

2. Uji *Transferability* (keteralihan)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam kuantitatif. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian diaplikasikan di tempat lain (Sugiyono, 2013).

3. Uji *Dependability* (reliabel)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dimana yang menjadi auditor dalam penelitian ini adalah pembimbing peneliti. Pada proses penelitian peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mencari data, jika tanpa kelengkapan tetapi datanya ada maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependable*.

4. Uji *Konfirmability* (obyektifitas)

Pada penelitian kualitatif uji *konfirmability* mirip dengan *dependability* sehingga pengujiaannya dapat dilakukan bermasaan dengan mengaitkan hasil dan proses yang telah dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pengendalian Internal Terhadap (KUR) di BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan.

Pengendalian internal terhadap kredit usaha rakyat (KUR) merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kur yang sehat. Apabila proses KUR dijalankan dengan baik sesuai maka dapat meminimalisir dampak kredit bermasalah yang akan dialami oleh bank. Berikut hasil wawancara dengan bapak Doni selaku mantra di bank BRI Unit Pasar Besar Pasuruan:

“Banyak yang harus dilakukan mantri untuk penyaluran kredit supaya tepat sasaran. Pengendalian internal untuk KUR di BRI ini sangat penting untuk meminimalisir kerugian bank. Oleh karena itu dalam KUR ini penyaluran kredit harus berdasarkan oleh prinsip-prinsip kehati-hatian dan dijalankan dengan baik ada 2 pengendalian kredit yang dilakukan oleh BRI *yaitu Preventive control of credit dan Reprensive control of credit*”

Dari hasil wawancara diatas diketahui ada dua pengendalian kredit yang dilakukan oleh BRI Unit Pasar Besar yaitu: *Preventive control of credit* adalah tindakan pengendalian kredit untuk pencegahan sebelum terjadi kredit bermasalah. *Reprensive control of credit* dimana tindakan pengendalian kredit apabila kredit bermasalah sudah terjadi.

1. Analisis Pengajuan KUR di BRI

Pada tahap pertama untuk pengendalian kredit adalah pengajuan kredit.

Mengenai permohonan kredit Bapak Doni menjelaskan bahwa:

“Di BRI ada macem-macam mas kredit ini, ada kupedes ada KUR, tapi mas disini mencari bagaimana penyaluran KUR ya, kalau di KUR ini persyaratan atau permohonannya lebih simpel daripada kredit lain”

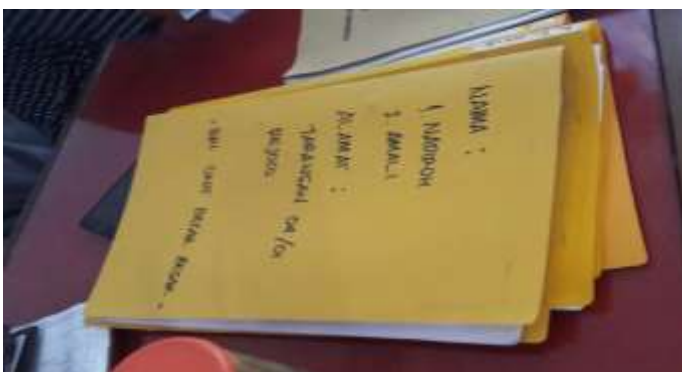
Disini dijelaskan bahwa kredit usaha rakyat (KUR) permohonannya lebih mudah dilakukan oleh nasabah daripada kredit lainnya. Di bank BRI ada beberapa kredit yaitu diantaranya KUPeDES dan KUR. Namun disini penulis hanya akan membahas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kalau KUR persyaratan bakunya atau persyaratan awal yaitu foto kopi KTP suami istri, KK, surat nikah, terus surat keterangan usaha dari kelurahan yang mengatakan bahwa dia punya usaha dan disahkan oleh pejabat desa.”

Dari keterangan Pak Doni ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah diantaranya adalah foto kopi KTP suami istri yang sudah menikah lalu kemudian kartu keluarga calon nasabah, surat nikah bagi yang sudah berumah tangga kemudian yang terakhir surat keterangan usaha. Persyaratan nasabah baru dan lama ada perbedaan seperti yang diungkapkan oleh Pak Doni sebagai berikut:

“Kemudian ada perbedaan antara nasabah baru dengan nasabah lama. Kalau yang lama tidak usah persyaratan tadi hanya survey ulang saja mas, selama masih berlaku”.

Gambar 4.1: Data Nasabah



Sumber: Data diolah, 2017.

Apabila persyaratan sudah dipenuhi oleh calon nasabah, maka data nasabah akan di map kuningkan sebagai arsip oleh bank. Jika syarat pengajuan kredit sudah

dipenuhi oleh calon nasabah maka proses penyaluran kredit bisa diteruskan. Sesuai dengan teori, syarat-syarat pengajuan kredit harus dipenuhi oleh nasabah, perencanaan harus tersusun secermat mungkin dengan memperhitungkan segala faktor yang mempengaruhi dan menentukan. Perencanaan yang disusun secara cermat dan baik memiliki ciri-ciri, antara lain bersifat objektif, jelas dan praktis serta mempermudah tercapainya suatu tujuan, bersifat fleksibel dan disusun secara rinci.

Gambar 4.2: Proses Pengajuan Kredit Calon Nasabah KUR



Sumber: Data diolah, 2017.

Foto diatas menunjukan proses awal pengajuan KUR oleh calon nasabah yang dilayani oleh CS. Apabila data calon nasabah sudah terpenuhi serta persyaratannya kemudian CS meberikan data calon nasabah kepada mantri untuk melakukan proses selanjutnya.

2. Analisis KUR di BRI

Anaisis kredit ini diterapkan untuk mengambil keputusan bahwa permohonan kredit oleh calon nasabah disetujui atau tidak. Pak Doni menyatakan bahwa analisis ini tergantung pada 5C. berikut penjelasannya:

“yang jadi patokan untuk menganalisis kredit yaitu 5c yaitu, *Character, capacity, capital, condition of economic* dan *collateral* itu digali pas waktu survey oleh petugas mantri”

Dari keterangan yang di jelaskan oleh Pak doni selaku mantra diketahui beberapa cara yang dilakukan bank BRI untuk menganalisis KUR yang diajukan oleh calon nasabah yaitu *Character, capacity, capital, condition of economic* dan *collateral*.

berikut penjelasan mengenai 5c menurut bapak doni selaku mantri:

“karakter calon nasabah ini bisa diliat dari wawancaranya, jadi yang abstrak coba divisualisasi oleh mantri, itu ada scoringnya itu. Disistem BRI ada scoringnya itu. Contoh dia menjawab sebelum ditanya atau menjawab ketika ditanya nanti dituangkan dilembar kerja mantri. Dan juga BI checking itu termasuk penilaian character calon nasabah.”

Disini petugas mantri bisa melihat karakter nasabah melalui sikap dan cara berbicara waktu wawancara. Hasil dari wawancara tersebut kemudian ada skornya. Langkah selanjutnya adalah BI checking yang dimana bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut sudah meminjam kredit di bank lain dan mengetahui apakah keadaan calon nasabah tersebut termasuk nasabah yang berkarakter baik dan tidak ada dalam daftar hitam.

Gambar 4.3: Proses analisis Kredit oleh Mantri Kepada Calon Nasabah



Sumber: Data diolah, 2017.

Foto tersebut menunjukkan bagaimana mantri mewawancarai calon nasabah apakah layak mendapatkan fasilitas KUR apakah tidak. Proses ini sangat penting

dilakukan, dari sini mantri bisa mengetahui sifat dan karakter calon nasabah tersebut.

Gambar 4.4: Proses Survei ke Calon Nasabah KUR



Sumber: Data diolah, 2017.

1. *Character* = Penilaian karakter calon nasabah bisa dilihat dari hasil wawancara dan BI Checking. BI checking ini dimana bertujuan agar mengetahui calon nasabah apakah sudah pernah melakukan kredit di bank lain atau tidak dan mengetahui calon nasabah tersebut pernah dalam keadaan kredit bermasalah ataupun tidak.

“Kemudian *capacity* ini dilihat dari kondisi fisik, pendapatan keuangan, persediaannya seperti apa, *flow cash* nya seperti apa, dan dilihat bisa dari lisan atau juga laporan tapi kebanyakan tidak ada laporan karena KUR ya dan belum *bankable*”

2. *Capacity* = Penilaian kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya bisa dilihat dari kondisi fisik usahanya, pendapatannya, keuangan calon nasabah, persediaan dan laporan usaha calon nasabah jika dirasa cukup baik maka calon nasabah bisa dikatakan mampu menjalankan usahanya dengan baik.

“*Capital* ini bisa dilihat dari banyak hal kekuatan keuangannya. Bisa dilihat dari aset yang dimiliki, dari tabungan ya dimiliki ya toh, dari jumlah persediaan pokoknya yang bisa ditarik dari kekuatan keuangan/finansial. Kekuatan finansial dilihat dari macem-macem, persediaan bisa terus sisa tabungan, dari aset juga bisa.”

3. *Capital* = Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah ini bisa dilihat dari persediaan pokok nasabah, tabungan yang dimiliki nasabah, jika tabungan nasabah banyak maka keuangannasabah bisa dikatakan baik, kemudian dapat juga dilihat dari aset yang dimiliki calon nasabah.

“Kalau penilaian kondisi ekonomi pasar kalau KUR ini kondisi ekonomi lokalnya bagaimana bagus apa tidaknya misalnya di Pasuruan ya toh itu secara umum yak apa, jika dalam bidang usaha calon nasabah prospek pemasarannya bagus maka bisa dilanjut, paling banyak nasabah menekuni usaha kebutuhan konsumen sehari-hari, jadi pemasarnya bagus.”

4. *Condition of economy* = Penilaian atas kondisi ekonomi ini dilihat dari kondisi pasar didaerah sekitar. KUR ini lebih dilihat dari prospek pemasaran secara mirko yaitu di daerah sekitar. Misalnya Kabupaten dan Kota Pasuruan apakah kondisi ekonominya sedang melemah atau tinggi yang berubungan dengan usaha calon nasabah. Serta juga bisa dilihat dari regulasi pemerintah pusat atau daerah yang mempengaruhi pemasaran usaha tersebut.

“*Corateral* itu secara hierarkinya KUR itu sendiri tidak ada. Tapi disini diminta untuk saling kepercayaan, bukan dijaminakan endak, kepercayaan saja.”

5. *Collateral* = Penilaian atas anggunan KUR ini tidak ada. Akan tetapi untuk mengurangi risiko kredit bermasalah, BRI tetap menggunakan agunan sebagai jaminan untuk pertimbangan dapat mencukupi pelunasan kewajiban calon nasabah dengan sistem kepercayaan.

Dalam analisis kredit KUR di BRI Unit Pasar Besar lebih mengutamakan aspek 5c, akan tetapi tidak mengesampingkan aspek lain-lain. Karena dengan aspek 5c, mantri sudah dapat menentukan apakah nasabah layak mendapatkan fasilitas KUR.

3. Analisis Agunan KUR di BRI

Dalam proses menganalisis agunan seperti yang dikatakan sebelumnya, hierarki agunan KUR seharusnya tidak ada, akan tetapi agunan tetap dilaksanakan oleh bank BRI seperti yang dikatakan Pak Doni sebagai berikut:

“Corateral itu secara hierarkinya KUR itu sendiri tidak ada. Tapi disini diminta untuk saling kepercayaan, bukan dijamin endak, kepercayaan saja untuk meminimalisir kerugian bank”

Di bank BRI, agunan/jaminan mempunyai kriteria yang harus dipenuhi oleh calon nasabah antara lain: bernilai ekonomis/bisa diturkarkan dengan uang, artinya agunan ini mempunyai nilai ekonomi atau apabila dijual akan bernilai uang, tidak boleh agunan barang rusak sehingga tidak bernilai ekonomi da tidak laku apabila dijual. Kemudian bukan benda waqof, artinya barang atau benda yang dijaminan tidak boleh benda yang bersifat waqof, karena barang yang bersifat waqof tidak bisa dijual atau dipindah tangankan. Selanjutnya benda tersebut dapat dipindah tangankan kepemilikannya, artinya apabila benda tersebut dijual maka akan beralih menjadi milik si pembeli bukan benda waqaf misalnya tanah waqaf tidak bisa di pindah tangankan kepemilikannya. Yang terkhir bisa berupa benda-benda bergerak misalnya persediaan, piutang kendaraan bermotor, tanah, setifikat rumah dan lain sebagainya.

Gambar 4.5: Proses Analisis Agunan



Sumber: Data diolah, 2017.

Gambar tersebut menunjukkan proses analisis agunan yang dilakukan oleh mantri. Misalnya agunan yang diserahkan oleh calon nasabah berupa kendaraan seperti truk yang bernilai ekonomis, bukan waqof, bisa dipindah tangankan kepemilikannya dan berupa benda bergerak. Kemudian untuk menentukan besaran agunan yang diajukan oleh calon nasabah, besaran agunan ditentukan oleh berapa jumlah pengajuan KUR yang diminta oleh calon nasabah apakah sebanding dengan harga agunan atau tidak. Apabila dikemudian hari nasabah tidak bisa memenuhi kewajibanya, maka agunan akan diambil alih kepemilikan dari nasabah ke Bank untuk mengurangi risiko kerugian bank. Menurut teori, agunan kredit usaha rakyat tidak ada akan tetapi di BRI Unit Pasar Besar tetap ada agunan untuk mengurangi risiko gagal bayar.

4. Analisis Penetapan Jumlah KUR di BRI

Penetapan jumlah kredit dilakukan berdasarkan berapa yang dibutuhkan oleh calon nasabah, akan tetapi masih dilakukan survey oleh mantri apakah calon

nasabah layak atau tidak diberikan jumlah kredit sesuai dengan yang diminta oleh calon nasabah, seperti yang dikatakan oleh Pak Doni sebagai berikut:

“Penetapan jumlah kredit berdasarkan survey dari mantri itu, aka nada wawancara lagi. Seperti Tanya omset, perputaran uang, berapa besar penjualan harian mingguan dan bulanan, nantikan ketahuan dari situ berapa kebutuhan dari calon nasabah dan berapa kekuatan besarnya usaha itu dan berapa modal yang diperlukan.”

Kemudian jenis usaha juga penting untuk diketahui oleh bank untuk menentukan jumlah kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah yang dikatakan oleh Pak Doni:

“Jenis usaha itu penting seperti usaha jasa atau non jasa. Kalau jasa itu kan butuh investasi besar tapi perputaran modal kecil, tapi kalau non jasa modalnya besar.”

KUR juga dibatasi jumlah maksimumnya atau yang biasa disebut Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu sebesar 25 juta rupiah. Jadi penetapan jumlah KUR meliputi berdasarkan survey, omset yang diperoleh nasabah, perputaran uang nasabah, jumlah agunan/jaminan, pengasilan harian-mingguan maupun bulanan sehingga akan diketahui jumlah modal yang dibutuhkan oleh calon nasabah. Akan tetapi masih dibedakan antara usaha jasa dan non jasa, jika jasa butuh investasi besar tetapi modal kecil apabila non jasa dibutuhkan modal besar. Dalam hal ini, yang tidak ada dalam teori untuk penetapan jumlah kredit adalah gaji, karena disini KUR ditujukan untuk pengusaha kecil dan bukan untuk karyawan swasta. Untuk menggantikan gaji yaitu omset usaha nasabah KUR. Seperti pada teori penetapan jumlah kredit yang diberikan oleh bank kepada calon nasabah tergantung dari survey mantri ke calon nasabah KUR, namun pada teorinya tidak disebutkan jenis usaha yang dijalankan oleh calon nasabah seperti usaha jasa atau non jasa. Di BRI ini perlu dilakukan survey jenis usaha apa yang dijalankan oleh calon nasabah untuk mengetahui jumlah kredit yang akan diberikan oleh bank kepada calon

nasabah. Apabila usaha non jasa membutuhkan modal besar dan jumlah kredit kemungkinan akan lebih besar daripada usaha jasa yang tidak membutuhkan modal lebih besar daripada usaha non jasa.

5. Analisis Persetujuan KUR di BRI

Dari berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan oleh bank sebelumnya, maka akan dilakukan persetujuan kredit untuk mengetahui apakah kredit yang diajukan oleh calon nasabah disetujui atau ditolak oleh pihak bank. Berikut yang dikemukakan oleh Pak Doni tentang persetujuan kredit di BRI:

“jadi KUR itu di setujui oleh kepala unit masing-masing unit kerja”

Sebelumnya juga dilakukan pengecekan berkas-berkas dilakukan mulai CS kemudian mantra dan selanjutnya oleh kepala unit sebelum persetujuan kredit.

“prosesnya dari pengajuan diterima oleh CS depan itu ya, kemudian deregister oleh kepala unit, kemudian kepala unit di mendisposisikan ke mantri-mantri yang ditunjuk, lalu mantrinya melakukan survey dan melakukan pekerjaan administrasi yaitu pengolahan data terus memasukan ke sistem. Setelah itu dinaikan usulannya ke kepala unit untuk dilakukan persetujuan kredit mantri hanya bertugas mengusulkan berapa kredit yang diperlukan, tetapi wewenang tetap di kepala unit.”

Jadi yang bertugas untuk menentukan/mempunyai wewenang memutuskan kredit apakah pengajuan kredit tersebut ditolak atau diterima dan jumlah besaran kredit adalah kepala unit. Dan disini mantra hanya bertugas untuk mengusulkan besaran kredit yang dibutuhkan oleh calon nasabah. Sesuai dengan teori, yang berwenang untuk mempersetujui apakah pengajuan kredit dari calon nasabah adalah pejabat bank yaitu kepala unit.

6. Proses Pencairan KUR di BRI

Pada pencairan kredit ini dilakukan perjanjian kredit antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Perjanjian kredit ini disusun dengan baik untuk

diharapkan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian pencairan kredit akan dilakukan setelah kedua belah pihak mendatangi perjanjian kredit. Perjanjian kredit hanya akan dilakukan apabila persyaratan kredit dipenuhi oleh calon nasabah. Setelah itu dalam pencairan kredit ada beberapa syarat yang dilakukan oleh calon nasabah. Berikut penjelasan syarat-syarat pencairan kredit oleh Pak Doni:

“pencairan kredit nasabahnya harus datang suami istri apabila sudah suami istri tanda tangan di kantor untuk mendatangi perjanjian hutang yang di materai, yang mengelola semua itu *customer service* setelah selesai semua dibayar oleh teller dan semua dilakukan di kantor.”

Apabila proses perjanjian kredit sudah dilakukan semua antara kedua belah pihak maka proses pencairan bisa dilaksanakan melalui CS dan Teller dengan persyaratan yang sudah disebutkan oleh mantri. Sesuai dengan teori, Pencairan kredit dilakukan setelah ditandatanganinya perjanjian antara bank dan debitur. Kredit hanya dapat dicairkan setelah seluruh persyaratan kredit yang ditetapkan komite kredit dan dokumen-dokumen perkreditan yang dibutuhkan serta kewajiban-kewajiban debitur telah dipenuhi. Proses pencairan ini dilaksanakan oleh petugas yang berbeda dengan yang memasarkan kredit. Dalam hal persyaratan, dokumentasi dan kewajiban debitur belum terpenuhi maka pencairan kredit hanya dapat dilakukan dengan persetujuan komite kredit yang menyetujui kredit tersebut.

7. Monitoring Atau Pengawasan Nasabah KUR oleh BRI

Setelah pencairan kredit dan nasabah sudah menerima dana dari bank, pihak BRI tidak serta merta melepaskan nasabah tersebut. Akan tetapi nasabah tersebut terus diawasi oleh bank untuk mencegah penurunan usaha yang dijalani oleh nasabah. Karena penurunan usaha nasabah bisa menyebabkan kualitas kredit yang diberikan dan akan menimbulkan gagal bayar. Penurunan kondisi

usaha nasabah bisa terlihat oleh tanda-tanda, jika bank sudah melihat tanda-tanda menurunnya usaha nasabah maka akan dilakukan suatu tindakan agar tidak terjadi kerugian bank. Monitoring nasabah ini di BRI dilakukan oleh mantri. Seperti yang dijelaskan oleh Pak doni sebagai berikut:

“Tanda-tanda menurunnya usaha nasabah bisa dilihat dari laporan usahanya menurun, omset menjurun, tabungan menyusut, apa bila didatangi rumahnya selalu tidak ada, ditelpon tidak diangkat, banyak alasan kalau pas ditagih banyak wes mas,”

Untuk mencegah terjadinya menurunnya usaha nasabah, bank BRI melalui mantrinya mempunyai beberapa pengawasan yang dijelaskan oleh Pak doni:

“Mantrinya melakukan kunjungan untuk melakukan pembinaan ke kenasabah yang diberi kredit, itu nanti ada komunikasi antara BRI dan nasabah tujuannya segera diketahui apabila ada risiko bisnis jika usahanya menurun atau macet dan akan dilakukan tindakan pencegahan. Dan melihat kondisi rekening nasabah, kemudian melihat laporan keuangan nasabah. Atau juga bertanya ke pihak ketiga, bisa tetangganya saudara atau orang disekitar nasabah”

Jadi ada beberapa untuk mendeteksi tanda-tanda usaha nasabah menurun sebelum bank mengalami kerugian akibat nasabah gagal bayar yaitu: Mengunjungi nasabah dan melakukan pembinaan. proses ini sangat penting untuk dilakukan, karena dengan mengunjungi nasabah akan mengetahui bagaimana kondisi nasabah beserta usahanya apakah lancar atau tidak. Jika mengalami kendala petugas mantri akan melakukan pembinaan atau memberi solusi agar usaha nasabah terus berlanjut. Kemudian dengan komunikasi dengan nasabah, hal ini dilakukan mantri dengan via telepon karena tugas mantri cukup banyak dan masih banyak nasabah yang harus dimonitoring sehingga dengan via telepon akan lebih mudah berkomunikasi dengan nasabah sehingga mengetahui keadaan usaha nasabah. Melihat laporan keuangan nasabah dilakukan agar mengetahui bagaimana keadaan keuangan nasabah dan usaha nasabah, jika laporan keuangannya nasabah mengalami penurunan maka akan dilakukan pembinaan

oleh mantra. Bertanya kepada pihak ketiga yaitu tetangga ataupun warga sekitar, hal ini sering dilakukan karena dengan bertanya kepada nasabah ditakutkan nasabah akan berbohong akan keadaan usahanya, jika bertanya kepada tetangga atau warga sekitar nasabah diharapkan mendapat informasi yang lebih akurat tentang nasabah. Selain pengawasan pada ekstern bank, faktor intern juga perlu diperhatikan. Faktor intern dapat melalui rekening nasabah, dari rekening nasabah tersebut dapat dilihat ketepatan waktu pembayaran angsuran setiap bulannya. Apabila rekening nasabah mengalami penurunan, maka besar kemungkinan usaha yang dijalani oleh nasabah juga mengalami penurunan. Kemudian jika hal tersebut terjadi maka petugas mantra akan melakukan kunjungan kembali kepada nasabah apakah usaha nasabah tetap mengalami penurunan yang sebelumnya diketahui melalui rekening nasabah yang mengalami penurunan. Berikut ini adalah kegiatan mantri melakukan tugas monitoring atau pengawasan terhadap nasabah KUR:

Gambar 4.6: Proses Monitoring atau Pengawasan kepada Nasabah KUR



Sumber: Data diolah, 2017.

Sebaiknya Ka. Unit juga ikut melakukan pengawasan, sehingga tidak hanya memberikan kepercayaan kepada bawahannya, tetapi juga ikut turun

langsung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Ka. Unit melakukan pengawasan dengan cara pengawasan fisik atau melakukan kunjungan langsung ke usaha nasabah. Kemudian hasil kunjungan mantri yang dimasukkan dalam laporan kunjungan nasabah (LKN) menjadi landasan yang penting dalam memutuskan menerima atau menolak kredit. Tidak adanya kewajiban bagi Ka. Unit untuk mengecek ulang kondisi usaha nasabah berpotensi meningkatkan kredit bermasalah. Hal ini disebabkan karena tidak ada kewajiban bagi Ka. Unit untuk mengevaluasi atau mengecek kembali hasil kunjung nasabah yang dilaporkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) oleh mantri. Hasil kunjungan mantri yang dimasukkan dalam laporan kunjungan nasabah (LKN) menjadi landasan yang penting dalam memutuskan menerima atau menolak kredit. Tidak adanya kewajiban bagi Ka. Unit untuk mengecek ulang kondisi usaha nasabah berpotensi meningkatkan kredit bermasalah. Hal ini disebabkan karena tidak ada kewajiban bagi Ka. Unit untuk mengevaluasi atau mengecek kembali hasil kunjung nasabah yang dilaporkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) oleh mantri.

4.2 Penyelesaian Kredit Bermasalah di BRI

Semua bank tidak menginginkan adanya kredit bermasalah, akan tetapi setiap pemberian kredit akan mengandung risiko kredit bermasalah, sehingga bank mempunyai kebijakan atau pedoman untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah yang lebih besar. Seperti yang dituturkan oleh Pak Doni sebagai berikut:

“Pasti mas. Setiap pemberian kredit itu selalu ada saja yang bermasalah, nah untuk itu bagaimana kita dari BRI meminimalisir kerugian gagal bayar yang lebih besar tidak terjadi.”

Untuk itu, bank BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan mempunyai beberapa penanganan jika kredit bermasalah itu sudah terjadi. Sehingga kredit bermasalah

tersebut secepatnya bisa teratasi. Menurut Pak Doni, harus mengetahui ciri-ciri dari kredit bermasalah itu seperti apa. Berikut penjelasannya:

“Kita harus tau dulu mas ciri-ciri dari kredit bermasalahnya itu seperti apa, gejalanya seperti apa, jadi kita tau kalau nasabah itu menunjukkan gejala akan gagal bayar. Yaitu tadi gejalanya misalnya ditelpon gak pernah diangkat, dikunjungi kerumah selalu tidak ada, telat bayar angsuran.”

Kredit bermasalah tersebut juga dikatakan apabila selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.

1. Analisis Sebab-Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah di BRI

untuk menyelesaikan kredit bermasalah, bank harus mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan munculnya kredit bermasalah tersebut. Apabila risiko itu muncul dari nasabah maka bank harus mengetahui sebab-sebab nasabah mengalami kesulitan dalam usahanya dan dari pihak bank akan membantu memberikan solusi. Berikut penjelasan dari Pak donii:

“Yang menyebabkan kredit bermasalah biasanya muncul dari nasabah mas, nah untuk itu dari pihak BRI akan melakukan pengendalian untuk menangani hal tersebut.”

Pak Doni juga menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah. berikut tuturnya:

“Sebagian besar usahanya mengalami penurunan omset, lalu kendala bisnis misalnya banyak tunggakan-tunggakan tagian, lalu kondisi ekonominya menurun, daya beli masyarakat menurun, lalu karakter nasabahnya jelek punya kemampuan bayar tapi hak bayar, tapi yang paling besar penurunan usaha, dan masih banyak lagi mas. Macem-macem pokoknya.”

Disini dapat disimpulkan apa saja sebab-sebab kredit bermasalah yang dihadapi oleh BRI unit Pasar Besar Kota Pasuruan menurut Pak Doni sebagai berikut:

Penurunan omset usaha nasabah. Dalam hal penurunan omset usaha nasabah sudah biasa terjadi dalam suatu usaha. Untuk itu, perlu dilakukan mencari apa

penyebab omset usaha mengalami penurunan. Kondisi ekonomi menurun juga salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah, ketika keadaan ekonomi nasabah menurun bisa karena nasabah mengalami musibah sehingga banyak mengeluarkan uang untuk membantu mengatasi musibah tersebut, misalnya salah satu keluarganya sakit dan memerlukan banyak uang untuk berobat sehingga ekonomi nasabah mengalami penurunan. Musibah internal, misalnya debitur mengalami sakit dan membutuhkan biaya besar untuk berobat dan tidak sanggup lagi membayar angsuran pinjaman di bank. Perselisihan keluarga sehingga menyebabkan perceraian. Daya beli masyarakat menurun juga mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah. ketika daya beli masyarakat menurun atas usaha yang dijalankan nasabah akan mengalami omset yang menurun juga. Kurangnya inovasi nasabah untuk mengembangkan usahanya dan persaingan usaha disekitar nasabah juga salah satu penyebab daya beli masyarakat menurun atas usaha nasabah. Karakter nasabah jelek, ketika sudah mampu membayar angsuran akan tetapi tidak juga membayarnya. Bencana alam yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya dan menimpa usahanya kemudian mengalami kebangkrutan. Misalnya kebakaran di tempat usahanya. akan tetapi jika terkena bencana usahanya maka pemerintah melakukan survey ke nasabah apakah benar-benar terkena musibah. Berikut penjelasan Pak Doni:

“Pemerintah atau BRI pusat apakah nasabah benar- benar mengalami musibah atau endak. Pernah terjadi di Tosari waktu meletusnya gunung bromo. Lalu diputihkan dan dibebaskan tanggungan angsuran. Semua itu akan ditanggung oleh pemerintah.”

Musibah sebagian besar terjadinya kredit bermasalah, karena musibah tidak ada yang tau kapan terjadi dan kepada siapa. Akan tetapi untuk musibah, tanggungan kepada nasabah dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah. Ketidak jujuran debitur atau nasabah dalam penggunaan kredit juga salah satu penyebab adanya

kredit bermasalah tersebut, misalnya dana yang diberikan oleh bank di salahgunakan yang awalnya untuk modal usaha akan tetapi digunakan untuk konsumsi dan tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit. Kemudian nasabah yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usahanya, sehingga usaha nasabah tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan penurunan usahanya.

2. Pembinaan Kredit Bermasalah di BRI

Langkah awal untuk penyelamatan dan menjaga fasilitas kredit yang disalurkan oleh bank kepada nasabah jika sudah menunjukkan gejala kredit bermasalah adalah pembinaan kredit bermasalah. pembinaan ini diharapkan untuk mencegah kredit bermasalah yang lebih besar dan merugikan bank. Banyak langkah-langkah bank BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan dalam pembinaan nasabah yang mengalami gejala-gejala kredit bermasalah. seperti yang diungkapkan oleh Pak Doni sebagai berikut:

“Pembinaannya yaitu didatangi oleh mantri maupun KA unit, dibina, mencari solusinya. Kemudian dicari masalahnya apa, kalau masalahnya penurunan usaha petugas BRI memberikan solusi dan masukan.”

Gambar 4.7: Proses Pembinaan Nasabah Kredit Bermasalah



Sumber: Data diolah, 2017.

Dari pihak BRI melalui mantri dan kepala unit akan mendatangi nasabah dan melakukan pendampingan kepada nasabah yang bermasalah. kemudian mencari penyebab apa yang membuat usanya menurun. Selajutnya mantri atau kepala unit akan memberikan masukan untuk membantu nasabah keluar dari permasalahannya. Pembinaan ini juga disertai pendekatan dari pihak bank, dengan cara tertulis maupun lisan. Misalnya pendekatan secara tertulis dengan memberikan surat tagihan, kemudian dengan surat peringatan dan surat tagihan I, II dan III. Kemudian pendekatan secara lisan bisa dilaksanakan dengan berkunjung kerumah nasabah atau tempat usaha nasabah sebelum diberikan surat tagihan untuk menanyakan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh nasabah. Apabila setelah diberi surat peringatan III tetapi nasabah belum juga melunasi kewajibannya maka pihak bank akan melakukan penilaian kembali atau survey kembali ketempat usahanya apakah benar-benar mengalami penurunan usaha. Akan tetapi, disini juga dilihat dari sisi pegawai banknya itu sendiri ketika dalam menangani kredit bermasalah. minyalnya pegawai bank tidak boleh membiarkan atau berusaha menutup-nutupi adanya atau terjadinya kredit

bermasalah, mendeteksi secara dini kemungkinan kredit bermasalah akan terjadi, menangani kredit bermasalah sesegera mungkin untuk menghindari semakin memburuknya kredit bermasalah tersebut dan pegawai harus menangani kredit bermasalah harus secara objektif dan tidak membedakan dengan nasabah-nasabah tertentu atau besaran pinjaman tertentu akan tetapi tetap memperhatikan skala prioritas.

3. Penyelamatan Kredit Bermasalah di BRI

Penyelamatan kredit ini dilakukan ketika kredit bermasalah ini sudah terjadi kepada nasabah yang termasuk daftar hitam. Untuk melindungi aset bank, maka dari pihak BRI akan melakukan cara untuk meminimalisir kerugian akibat gagal bayar yang lebih besar. Berikut pernyataan Pak Doni mengenai langkah-langkah untuk penyelamatan kredit bermasalah:

“ya tetap merupakan tagihan yang harus diselesaikan. Kalau di BRI itu nasabah yang bermasalah itu didaftar hitamkan. Untuk melakukan penyelamatan kreditnya ya itu sama kayak bank-bank lain seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*.”

Seperti yang dikatakan oleh Pak Doni, sistem/langkah-langkah yang diambil dalam penyelamatan kredit bermasalah yaitu sama halnya bank-bank lain seperti yang pertama.

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) untuk kemudian di jadwalkan kembali pembayaran untuk di buat perjanjian *rescheduling* tersendiri. Yang kedua

persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Dalam *reconditioning* ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan. Yang terakhir penataan kembali (*restructuring*) perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Penyelesaian kredit bermasalah secara damai juga dapat dilakukan terhadap nasabah yang betitikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh secara damai ini lebih baik daripada penyelesaian melalui jalur hukum. Untuk penyelesaian kredit bermasalah secara damai dapat dilakukan dengan cara pemberian fasilitas keringanan bunga yakni pemberian fasilitas keringanan bunga ini hanya diberikan kepada nasabah penunggak dengan kolektabilitas diragukan yang artinya diragukan mampu melunasi kewajibannya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara penjualan agunan dibawah tangan yang artinya penjualan agunan ini dilakukan agar debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan atau menjual sendiri agunannya.

4.3 Analisis Sistem Pengendalian Kredit Usaha Rakyat

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank sangat membantu permodalan UMKM di daerah sekitar bank tersebut. Kredit yang ditawarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimana suku bunga lebih rendah dari kredit pada umumnya yaitu sebesar 9%. Pada pinjaman ini hanya khusus diberikan pada UMKM untuk modal usaha dan bukan diperuntukan untuk pengusaha besar atau kredit konsumtif. Untuk menjaga aset dan aktivitas kredit yang diberikan bank agar berjalan baik dan sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh bank diperlukan suatu pengendalian internal yang mampu menjamin jalannya kredit tersebut. Untuk menjawab bagaimana proses pemberian kredit di bank BRI mengenai prosedur saat pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diuraikan dalam analisis dari data yang sudah didapat dari penelitian sebagai berikut:

1. Pengajuan Kredit

Pada saat pelaksanaan pengajuan kredit usaha rakyat masih banyak kendala yang dihadapi oleh bank. Misalnya dalam pengajuan KUR perlu dilengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah namun, sebagian besar kendala dari calon nasabah tersebut adalah masalah ijin usaha calon nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank melalui *customer service* dan mantri membantu memberikan surat untuk mendapatkan ijin usaha dari pejabat desa atau kelurahan setempat. Akan tetapi dalam proses pengajuan kredit ini benar-benar melakukan dengan obyektif dan tidak secara subyektif yang artinya melihat calon nasabah apakah dikenal maupun tidak dikenal oleh pegawai bank tersebut. . saat sesudah melengkapi syarat-syarat pengajuan kredit, dilakukan survey ke calon nasabah untuk meyakinkan adanya usaha nasabah. Apabila dalam pengajuan kredit tersebut dilakukan oleh nasabah lama dan nasabah lama tersebut akan meminjam kredit usaha rakyat kembali maka tidak perlu melakukan melengkapi

syarat-syarat awal kembali, hanya melakukan survey ulang ke nasabah lama tersebut.

2. Analisis KUR di BRI

Pelaksanaan KUR di BRI dilakukan dengan cara 5c yaitu *character, capacity, capital, condition of economic dan collateral*. Pada pelaksanaan 5c tersebut, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai bank, terutama pada karakter nasabah. Tidak sedikit karakter nasabah yang bisa dikatakan kurang baik yang di alami oleh bank sehingga dapat merugikan pihak bank dan menyebabkan gagal bayar. Misalnya pada saat wawancara ekspresi dan jawaban calon nasabah meyakinkan tentang memiliki usaha akan tetapi pada saat survei ke tempat calon nasabah berbohong akan adanya usahanya tersebut ternyata calon nasabah tidak memiliki usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, bank melalui mantri selaku yang bertugas untuk mensurveyi calon nasabah melakukan mendatangi tempat usahanya tersebut dan menanyakan kepada tetangga sekitar apakah calon nasabah tersebut benar-benar memiliki usaha. Disisi pegawai ditemukan penyimpangan atas proses analisis KUR tersebut misalnya pada saat akan melakukan survei mantri meminta ijin ke kepala unit untuk melakukan survei akan tetapi, mantri melakukan penyimpangan yaitu melakukan kegiatan yang berlawanan dengan kegiatan yang seharusnya diertakan saat bertugas mensurvei calon nasabah. . Misalnya dengan melakukan tidur-tiduran di masjid pada saat ijin survei. Hal ini bisa menyebabkan pengendalian kurang baik yang dilakukan oleh salah satu petugas mantri dan bisa menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari.

3. Analisis Agunan KUR di BRI

Dalam analisis agunan KUR semestinya tidak ada yang namanya agunan, akan tetapi di BRI tetap dilaksanakan agunan untuk bertujuan mengurangi risiko kredit macet yang akan merugikan bank. Pada saat proses analisis agunan, BRI

unit Pasar Besar sudah melaksanakan sesuai kebijakan yang dibuat oleh BRI pusat yaitu mengecek keadaan fisik agunan apakah layak menjadi jaminan ataupun tidak. Dalam hal ini apabila nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya maka jaminan yang diberikan oleh nasabah tersebut akan dilelang oleh pihak perbankan untuk menutupi kerugian yang dialami bank akibat gagal bayar.

4. Analisis Penetapan KUR di BRI

Penetapan KUR sudah dijalankan sesuai kebijakan yang dibuat oleh pihak bank. Pada hal ini, kepala unit selaku yang berwenang memutuskan berapa nominal pinjaman yang diberikan kepada calon nasabah menugaskan mantri untuk melakukan survey usaha yang dijalani oleh calon nasabah tersebut. Dalam melakukan penetapan jumlah kredit mantri tidak melihat secara subyektif calon nasabah melainkan secara obyektif menurut hasil survey mantri sebelumnya. Penetapan jumlah kredit ini mantri melihat seberapa besar usaha nasabah, omset dan jumlah agunan yang diberikan oleh nasabah.

5. Persetujuan KUR di BRI

Pelaksanaan persetujuan KUR yang berwenang adalah kepala unit bank. Disini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh BRI pusat dalam pelaksanaan persetujuan kredit. Dalam prosesnya mantri sesudah melakukan survey dan menetapkan jumlah kredit yang harus diberikan ke calon nasabah akan memberikan usulan berapa yang harus diberikan kepada calon nasabah kemudian kepala unit tetap mutlak yang mempersetujui apakah calon nasabah tersebut. dalam teorinya yang berwenang pelaksanaan persetujuan kredit adalah petinggi bank atau kepala bank, dan sesuai teori di BRI Unit Pasar Besar yang berwenang dalam persetujuan kredit adalah kepala unit.

6. Pencairan Kredit

Proses pencairan kredit usaha rakyat di BRI sudah berjalan sesuai peraturan. Sebelum proses pencairan kredit ini, pihak bank membuat perjanjian

dengan calon nasabah sebelum pencairan kredit. Sesuai dengan teori perjanjian tersebut bertujuan untuk calon nasabah agar melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan dana yang dipinjam dari bank. Apabila perjanjian telah dibuat dan disepakati bersama maka pencairan kredit dapat dilaksanakan melalui teller. Disini teller menjalankan amanat sesuai dari kepala unit untuk mengecek syarat apa yang diperlukan dalam melakukan proses pencairan kredit. Apabila ditemukan kekurangan dalam syarat pencairan kredit maka pencairan kredit tidak bisa dilakukan. Pencairan kredit nasabahnya harus datang suami istri apabila sudah suami istri tanda tangan di kantor untuk mendatangi perjanjian hutang yang di materai, yang mengelola semua itu *customer service* setelah selesai semua dibayar oleh teller dan semua dilakukan di kantor.

7. Monitoring atau pengawasan

Menurut teori yang melakukan pengawasan kepada nasabah adalah kepala unit dan mantri. Akan tetapi di BRI Unit Pasar Besar yang bertugas mengawasi nasabah hanya mantri. Mantri melakukan pengawasan melalui via telepon dalam waktu satu kali dalam tiga hari. Dalam pengawasan mengunjungi nasabah mantri melakukan kunjungan minimal seminggu satu kali untuk memastikan keadaan usaha calon nasabah. Disini mantri dalam melakukan pengawasan juga memberikan solusi atau masukan kepada nasabah supaya usaha yang dijalankan mengalami kemajuan. Tidak hanya melalui via telepon dan kunjungan nasabah, pengawasan nasabah juga dilakukan oleh mantri melalui keadaan rekening nasabah apakah dalam keadaan bagus ataupun sebaliknya.

8. Sebab-sebab kredit bermasalah

Sebelum melakukan tindakan penyelesaian kredit bermasalah, mantri mencari tau apa saja penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut. petugas mantri sudah mendatangi nasabah yang terdeteksi telah mengalami kredit bermasalah. pada saat mendatangi nasabah tersebut mantri menanyakan apa

yang menjadi kendala sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam usahanya. sebagian besar kendala yang dihadapi oleh nasabah adalah penurunan omset. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh mantri adalah pembinaan kepada nasabah untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Pada saat melakukan pembinaan, mantri memberikan solusi dan nasihat kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya.

9. Penyelesaian kredit bermasalah

Seperti bank-bank pada umumnya, apabila kredit bermasalah itu sudah terjadi maka pihak bank melakukan tindakan Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) untuk kemudian di jadwalkan kembali pembayaran untuk di buat perjanjian *rescheduling* tersendiri. Yang kedua persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Dalam *reconditioning* ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan. Yang terakhir penataan kembali (*restructuring*) perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi

penyertaan dalam perusahaan, yang dapat di sertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

BAB IV

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dalam skripsi ini membahas tentang pengendalian internal supaya tidak terjadi kredit macet pada kebijakan baru pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia, dilihat dari segala tindakan yang telah dilakukan disini terlihat bahwa pengendalian internal itu perlu untuk menjaga kesehatan bank. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Unit Pasar Besar Kota Pasuruan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan survey ke nasabah, masih ada pegawai mantri yang melakukan penyimpangan kerja dalam melakukan survey yaitu ketika melakukan survey melainkan melakukan kegiatan lain di luar survey sehingga melupakan tugas survey ke calon nasabah tersebut
2. Pengendalian internal pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan masih memiliki beberapa kekurangan, kekurangan tersebut diantaranya:
 - a. Struktur organisasi pada BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan masih terdapat kekurangan yaitu adanya perangkatan fungsi mantri yang bertugas melakukan survey, analisis dan penagihan.
 - b. Pada pengajuan kredit belum adanya lembar *checklist* yang dapat mempermudah nasabah untuk memenuhi kelengkapan berkas-berkas pengajuan kredit.

- c. Pada Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) masih berbentuk buku yang didalamnya terdapat banyak debitur dan tidak dapat disimpan di dalam berkas nasabah yang bersangkutan.
 - d. Masih ada perangkatan fungsi pada mantri yang tugasnya dari *survey* lapangan, analisis kredit, dan penagihan dilakukan oleh satu orang.
3. Pada saat penolakan kredit belum adanya surat keterangan penolakan kredit yang disertai dengan alasan kredit tidak dapat diproses.
 4. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan masih memiliki beberapa kekurangan, kekurangan tersebut pada saat pengawasan kredit Ka. Unit belum ikut terjun langsung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nasabah yang bersangkutan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas maka penulis akan memberikan saran perbaikan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki kelemahankelemahan tersebut dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga dapat meningkatkan pengendalian intern. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan tugas *survey* ke calon nasabah, petugas mantri harus melakukan tugasnya sesuai kebijakan bank dan tidak melakukan kegiatan lain diluar kegiatan *survey* ke calon nasabah.

2. Sebaiknya mantri hanya bertugas mensurvey, dan melakukan penagihan kredit.
3. Sebaiknya bagian CS dapat melakukan analisis kredit agar tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi-fungsi yang terkait.
4. Seandainya pada saat kredit tidak dapat diproses maka sebaiknya membuat surat penolakan kredit dan mencantumkan alasan kredit tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.
5. Kepala unit sebaiknya ikut berperan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Ka. Unit juga melakukan pengecekan ulang secara acak terhadap calon nasabah yang sudah di survey oleh mantri sebelum putusan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistya, 2011. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penjualan Jasa Perawatan Air Conditioner dan Piutang pada CV. Mavista Technic*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Aditya, Cindy. 2016. *Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Pada Pt. Bpr Shinta Daya Sleman, Yogyakarta*. Jurnal akuntansi Jurusan Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro.
- Anggawirya, Erhans, 2000. *Sistem Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: PT. Ercontara Rajawali.
- Azalia Meidiana. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas Pada Perusahaan Distributor (Studi Kasus Pada Pt. Javas Tripta Gemala)*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Bastian. 2000. *Sistem Akuntansi Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat,
- Boynton, Johnson, Kell. 2003. *Modern Auditing*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Esterberg, Kristin G. 2002 *Qualitative Methods in social Research*, Me Graw Hill.
- Faiz, Ihda. 2015. *Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus Pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri*. Universitas Gadjah Mada, Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 6 Nomor 1 Halaman 1-174 Malang, April 2015 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879.
- Handayani, Annisa 2010. *Sistem Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Hasibuhan. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Heykal, Evi. 2014. *Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk*. Accounting and Finance Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University Jln. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480. Binus Business Review Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 194-209.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta Pusat. Gramedia.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta. Gramedia.
- Jusup, Al, Haryono. 2001. *Auditing*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Unit dan Percetakan AMP YPKN.

- Machpudin. 2008. *Peranan Sistem Akuntansi Penggajian Dalam Mengefektifan Sistem Pengendalian Intern Gaji Dan Upah Pada Pt. X Bandung*. Bandung: Universitas Sangga Buana YPKP. Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 2, No. 2, Desember 2008, 119-131.
- Mahmoeddin. 2002. Kredit Bermasalah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marshall, Paul. 2004. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2014. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Martanti, Retno dan Masyuroh. 2015. *Peran Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Dalam Meminimalisasi Non Performing Loan Pada Pt Bank Mitraniaga, Tbk*. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 1 No. 2 Tahun 2015.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh. 2011. *Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri)*. STKIP PGRI Jombang. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.13, No. 1, Maret 2011: 76-82
- Mulyadi. 2002. Auditing. Jakarta : Salemba Empat.
- , 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Prismawanti, Pramuris. 2014. *Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Studi Pada Pt. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta*. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pujianik, Rindah. 2011. *Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip/Pp No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Trunojoyo Madura. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 7, Nomor 2, September 2011, 102-116.
- Rapina, Leo. 2011. *Peranan Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasional Pada Siklus Persediaan dan Pergudangan (Studi Kasus Pada PT.Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Bandung)*.Jurnal Ilmiah Akuntansi Univ.Kristen Maranatha. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Nomor 06 Tahun ke-2 September-Desember 2011.
- Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart.2006. Accounting Information System. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabi, Nisa M. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Itern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesi Cabang Limboto*. Jurnal Akuntansi Jurusan Akuntansi Universitas Gorontalo.
- Safriana, Fifi. 2014. *Peranan Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Di Pt. Taspen*

(Persero) Tanjungpinang). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Saraswati, I Ketut Yadnyana. 2014. *Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Denpasar*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.

Sari, Dewi Nilam. 2016. *Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Guna Meminimalisir Risiko Kredit Macet Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Artha Karya*. Jurnal Akuntansi Jurusan Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Administratif*. Bandung: CV Alfabeta.

-----, 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.

Zulviano. 2014. *Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada Pt Sarana Sulsel Ventura*. Jurnal Stie Nobel Indonesia.

Wawancara

Informan :

1. Yayoek Tri Winahyu (Kepala BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan)

2. Hadi. S (mantri BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan)

3. Doni H (Mantri KUR BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan)

Interviewer : Adie Susilo

Hari/Tanggal : Senin, 14 Agustus 2017

Tempat : Bank BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan

Wawancara dengan Hadi. S (mantri BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan)

Adie : menurut bapak kur itu seperti apa dan apa saja keunggulannya?

Pak Hadi : KUR ini mempunyai suku bunganya ini lebih rendah, lalu KUR ini juga progam pemerintah ya yang dimasukkan ban-bank BUMN terutama misalnya BNI, MANDIRI, dan BRI. Namun perkembangan terakhir bank swasta juga dikasih walaupun terbatas tapi yang paling besar jatahnya itu diberikan kepada BRI.

Adie : kira-kira suku bunganya berapa pak?

Pak Hadi : Suku bunga KUR ini sangat rendah sekali sekitar 0,4 dikali 12 bulan ketemu 4,8% pokoknya dibawah 10% lah."

Adie : berarti kecil sekali ya pak?

Pak Hadi : Iya mAs, Kecil sekali makanya masyarakat pada antusias terutama UMKM

Adie : Nah, mengenai antusias masyarakat, bagaimana sih pak respon masyarakat tentang adanya KUR ini?

Pak Hadi : Pengamatan saya sangat disambut baik karena banyak keuntungan.dari pemerintah juga memberikan batasan siapa-siapa yang menerima, harus usaha-usaha kecil yang menerima dan belum bankable atau yang belum pernah akses perbankan itu sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Adie : bagus berarti responnya ya pak.

Pak Hadi : iya mas.

Wawancara dengan Yayoek Tri Winahyu (Kepala BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan)

Adie : bagaimana pelaksanaan pengendalian internal Kerja di BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan?

Bu Yayoek : Pengendalian internal ini ada 4 mas yang paling penting, yang pertama struktur organisasi, kedua sistem wewenang, ketiga praktik kerja sehat yang terakhir karyawan yang berkualitas.

Adie : untuk struktur organisasi BRI Pasar Besar ini bagaimana bu?

Bu Yayoek : saya tuliskan aja ya mas.

Adie : iya bu. Selanjutnya sistem wewenang itu bagaimana bu?

Bu Yayoek : Sistem wewenang BRI ya berdasarkan pekerjaannya masing-masing, mantra punya wewenang sendiri, kepala unit punya wewenang sendiri, wewenang secara jabatan maupun finansial. Kalau hal finansial namanya BDPK. Selanjutnya bisa tak tuliskan ya.

Adie : iya bu. Kemudian praktik kerja sehat di bank ini bagaimana?

Bu Yayoek : Good corporate governance itu praktek kerja sehat itu. Di BRI sangat diterapkan dan disosialisasikan. Akuntabilitas ya, terbuka dan tercatat di BRI sangat diutamakan karena perbankan. Program pemerintah itu Good corporate governance penyelenggaraan organisasi secara sehat. Ini nanti kamu bisa cari di web nya BRI saja. Semua ada disitu kok!

Adie : enggeh bu. Yang terakhir bagaimana memilih karyawan yang berkualitas bu?

Bu Yayoek : yang perlu ada dalam diri karyawan disini adalah pendidikan, pengalaman dan Akhlak, jika salah satu tidak ada maka keadaan bank akan tidak sehat. Dan juga seimbang antara kewajiban dan penghargaan, di BRI juga ada 5

hal yang menjadi prinsip Karyawan BRI dan filosofi bank BRI itu yang harus diseimbangkan sehingga muncul kinerja yang optimal.

Adie : nah, prinsip karyawan BRI apa saja bu?

Bu Yayoek : integritas, profesionalisme, keteladanan, kepuasan nasabah, penghargaan kepada SDM.

Adie : itu harus ada di karyawan BRI ya bu?

Bu Yayoek : iya mas, itu harus ada di semua karyawan BRI.

Wawancara dengan Doni H (Mantri KUR BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan)

Adie : bagaimana proses pengendalian internal terhadap kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Unit Pasar Besar Kota Pasuruan?

Pak Doni : Banyak yang harus dilakukan mantri untuk penyaluran kredit supaya tepat sasaran. Pengendalian internal untuk KUR di BRI ini sangat penting untuk meminimalisir kerugian bank. Oleh karena itu dalam KUR ini penyaluran kredit harus berdasarkan oleh prinsip-prinsip kehati-hatian dan dijalankan dengan baik ada 2 pengendalian kredit yang dilakukan oleh BRI yaitu *Preventive control of credit* dan *Repressive control of credit*.

Adie : apa itu *Preventive control of credit* dan *Repressive control of credit*?

Pak Doni : *Preventive control of credit* adalah tindakan pengendalian kredit untuk pencegahan sebelum terjadi kredit bermasalah. selanjutnya *repressive control of credit* dimana tindakan pengendalian kredit apabila kredit bermasalah sudah terjadi.

Adie : untuk langkah awal permohonan KUR ini seperti apa pak?

Pak Doni : Di BRI ada macem-macem mas kredit ini, ada kupedes ada KUR, tapi mas disini mencari bagaimana penyaluran KUR ya, kalau di KUR ini persyaratan atau permohonannya lebih simpel daripada kredit lain.

Adie : mmmm

Pak doni : Kalau kur persyaratan bakunya atau persyaratan awal yaitu foto kopi KTP suami istri, KK, surat nikah, terus surat keterangan usaha dari kelurahan yang mengatakan bahwa dia punya usaha dan disahkan oleh pejabat desa.

Adie : kemudian untuk menganalisis nasabah KUR ini bagaimana pak?

Pak Doni : yang jadi patokan untuk menganalisis kredit yaitu 5c yaitu, *Character, capacity, capital, condition of economic* dan *collateral* itu digali pas waktu survey oleh petugas mantri.

Adie : nah bagaimana menilai character nasabah KUR itu sendiri pak di BRI?

Pak Doni: karakter calon nasabah ini bisa dilihat dari wawancaranya, jadi yang abstrak coba divisualisasi oleh mantri, itu ada scoringnya itu. Di sistem BRI ada scoringnya itu. Contoh dia menjawab sebelum ditanya atau menjawab ketika ditanya nanti dituangkan dilembar kerja mantri. Dan juga BI checking itu termasuk penilaian character calon nasabah. Kemudian juga dengan BI checking ini dimana bertujuan agar mengetahui calon nasabah apakah sudah pernah melakukan kredit di bank lain atau tidak dan mengetahui calon nasabah tersebut pernah dalam keadaan kredit bermasalah ataupun tidak.

Adie : lalu *capacity* ini seperti apa analisisnya?

Pak Doni: Kemudian *capacity* ini dilihat dari kondisi fisik, pendapatan keuangan, persediaannya seperti apa, *flow cash* nya seperti apa, dan dilihat bisa dari lisan atau juga laporan tapi kebanyakan tidak ada laporan karena KUR ya dan belum *bankable*.

Adie : selanjutnya capital?

Pak Doni: *Capital* ini bisa dilihat dari banyak hal kekuatan keuangannya. Bisa dilihat dari aset yang dimiliki, dari tabungan ya dimiliki ya toh, dari jumlah persediaan pokoknya yang bisa ditarik dari kekuatan keuangan/finansial. Kekuatan finansial dilihat dari macem-macem, persediaan bisa terus sisa tabungan, dari aset juga bisa.

Adie : kalau *condition of economy* ini pak bagaimana?

Pak Doni: Kalau penilaian kondisi ekonomi pasar kalau KUR ini kondisi ekonomi lokalnya bagaimana bagus apa tidaknya misalnya di Pasuruan ya toh itu secara

umum yak apa, jika dalam bidang usaha calon nasabah prospek pemasarannya bagus maka bisa dilanjut, paling banyak nasabah menekuni usaha kebutuhan konsumen sehari-hari, jadi pemasarannya bagus.

Adie : jadi kebanyakan dilihat dari kondisi ekonomi Pasuruan ya pak?

Pak Doni : iya mas. Soalnya BRI Pasar Besar nasabahnya dari area Pasuruan.

Adie : yang terakhir *collateral* pak, bagaimana itu?

Pak Doni: *Corateral* itu secara hierarkinya KUR itu sendiri tidak ada. Tapi disini diminta untuk saling kepercayaan, bukan dijamin endak, kepercayaan saja.

Adie : jadi tetap ada ya pak?

Pak Doni : iya mas, Tetap ada.

Adie : untuk menganalisis agunan ini bagaimana pak?

Pak Doni : seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya KUR ini tidak ada agunan, namun untuk meminimalisir terjadinya risiko, tetep ada agunan.

Nah untuk agunan KUR ada kreterianya seperti bernilai ekonomis/bisa diturkarkan dengan uang, bukan benda waqof, dapat dipindah tangankan kepemilikannya, bisa berupa benda-benda bergerak misalnya persediaan, piutang kendaraan bermotor, tanah, setifikat rumah dan lain sebagainya.

Adie : berarti agunan sama kredit yang dipinjam harus sebanding ya pak?

Pak Doni : iya mas harus sebanding, dan jika nasabah dikemudian hari tidak bisa melunasi kewajibannya, maka agunan dengan terpaksa diambil alih oleh bank.

Adie : kemudian penetapan jumlah kredit Dan struktur pembiayaan di BRI?

Pak Doni : Penetapan jumlah kredit berdasarkan survey dari mantri itu, aka nada wawancara lagi. Seperti Tanya omset, perputaran uang, berapa besar penjualan harian mingguan dan bulanan, nantikan ketahuan dari situ berapa kebutuhan dari calon nasabah dan berapa kekuatan besarnya usaha itu dan berapa modal yang diperlukan.

Jenis usaha itu penting seperti usaha jasa atau non jasa. Kalau jasa itukan butuh investasi besar tapi perputaran modal kecil, tapi kalau non jasa modalnya besar.

Adie : untuk batas maksimum pemberian KUR berapa pak?

Pak Doni : dua puluh lima juta mas.

Adie : selanjutnya jika analisis-analisis sudah dilakukan, untuk persetujuan KUR ini oleh siapa dan bagaimana pak?

Pak Doni : “jadi KUR itu di setuju oleh kepala unit masing-masing unit kerja.

prosesnya dari pengajuan diterima oleh CS depan itu ya, kemudian deregister oleh kepala unit, kemudian kepala unit di mendisposisikan ke mantra-mantri yang ditunjuk, lalu mantrinya melakukan survey dan melakukan pekerjaan administrasi yaitu pengolahan data terus memasukan ke sistem. Setelah itu dinaikan usulannya ke kepala unit untuk dilakukan persetujuan kredit mantra hanya bertugas mengusulkan berapa kredit yang diperlukan, tetapi wewenang tetap di kepala unit.

Adie : apabila sudah dapat persetujuan oleh kepala unit, terus bagaimana cara pencairan KUR itu sendiri?

Pak Doni: pencairan kredit nasabahnya harus datang suami istri apabila sudah suami istri tanda tangan di kantor untuk mendatangi perjanjian hutang yang di materai, yang mengelola semua itu *customer service* setelah selesai semua dibayar oleh teller dan semua dilakukan di kantor.

Adie : jika sudah pencairan kredit, apakah proses kredit selesai pak? Apakah ada pengawasan lagi ke nasabah?

Pak Doni : tentu masih ada monitoring mas, pengawasan ke nasabah itu penting agar tidak terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Adie : seperti apa pak monitoring di BRI Pasar Besar?

Pak Doni : Mantrinya melakukan kunjungan untuk melakukan pembinaan ke kenasabah yang diberi kredit, itu nanti ada komunikasi antara BRI dan nasabah tujuannya segera diketahui apabila ada risiko bisnis jika usahanya menurun atau macet dan akan dilakukan tindakan pencegahan. Dan melihat kondisi rekening nasabah, kemudian melihat laporan keuangan nasabah. Atau juga bertanya ke pihak ketiga, bisa tetangganya saudara atau orang disekitar nasabah.

Tanda-tanda menurunnya usaha nasabah bisa dilihat dari laporan usahanya menurun, omset menjurun, tabungan menyusut, apa bila didatangi rumahnya

selalu tidak ada, ditelpon tidak diangkat, banyak alasan kalau pas ditagih banyak wes mas.

Jadi ada beberapa untuk mendeteksi tanda-tanda usaha nasabah menurun sebelum bank mengalami kerugian akibat nasabah gagal bayar yaitu: mengunjungi nasabah dan melakukan pembinaan, komunikasi dengan nasabah, melihat laporan keuangan nasabah, bertanya kepada pihak ketiga yaitu tetangga ataupun warga sekitar, monitoring rekening nasabah.

Adie : ribet juga ya pak ya hahah

Pak Doni : iya mas hahaha, makanya jadi pegawai bank itu susah. Kepala unit juga ikut mengawasi nasabah juga mas.

Adie : bagaimana itu pak?

Pak Doni: . Ka. Unit melakukan pengawasan dengan cara pengawasan fisik atau melakukan kunjungan langsung ke usaha nasabah. Kemudian hasil kunjungan mantri yang dimasukkan dalam laporan kunjungan nasabah (LKN) menjadi landasan yang penting dalam memutuskan menerima atau menolak kredit. Tidak adanya kewajiban bagi Ka. Unit untuk mengecek ulang kondisi usaha nasabah berpotensi meningkatkan kredit bermasalah.

Adie : tapi kredit bermasalah itu pasti ada ya pak?

Pak Doni : Pasti mas. Setiap pemberian kredit itu selalu ada saja yang bermasalah, nah untuk itu bagaimananya kita dari BRI meminimalisir kerugian gagal bayar yang lebih besar tidak terjadi.”

Adie : lalu jika kredit bermasalah itu sudah terjadi, bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah tersebut?

Pak Doni : Kita harus tau dulu mas ciri-ciri dari kredit bermasalahnya itu seperti apa, gejalanya seperti apa, jadi kita tau kalau nasabah itu menunjukkan gejala akan gagal bayar. Yaitu tadi gejalanya misalnya ditelpon gak pernah diangkat, dikunjungi kerumah selalu tidak ada, telat bayar angsuran. Kredit bermasalah tersebut juga dikatakan apabila selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.

Adie : apa sebab-sebab dari kredit bermasalah biasanya itu pak?

Pak Doni : yang menyebabkan kredit bermasalah biasanya muncul dari nasabah mas, nah untuk itu dari pihak BRI akan melakukan pengendalian untuk menangani hal tersebut.

Sebagian besar usahanya mengalami penurunan omset, lalu kendala bisnis misalnya banyak tunggakan-tunggakan tagian, lalu kondisi ekonominya menurun, daya beli masyarakat menurun, lalu karakter nasabahnya jelek punya kemampuan bayar tapi hak bayar, tapi yang paling besar penurunan usaha, dan masih banyak lagi mas. Macem-macam pokoknya.

Adie : kalau kena bencana alam gitu pak, kan gak ada yang tau?

Pak Doni : nah itu ada prosedurnya sendiri mas. Pemerintah atau BRI pusat apakah nasabah benar- benar mengalami musibah atau endak. Pernah terjadi di Tosari waktu meletusnya gunung bromo. Lalu diputihkan dan dibebaskan tanggungan angsuran. Semua itu akan ditanggung oleh pemerintah.

Adie : nah, kan sebab-sebabnya sudah diketahui, terus bagaimana cara pembinaan jika suda terindikasi akan terjadi kredi bermasalah?

Pak Doni : Pembinaannya yaitu didatangi oleh mantri maupun KA unit, dibina, mencari solusinya. Kemudian dicari masalahnya apa, kalau masalahnya oenurunan usaha petugas BRI memberikan solusi dan masukan.

Adie : jadi didatangi langsung gitu ya pak?

Pak Doni : iya mas.

Adie : apabila kredit bermasalah sudah terjadi, dan gak bisa bibina lagi bagaimana cara penyelesaiannya pak di BRI?

Pak Doni : ya tetep merupakan tagihan yang harus diselesaikan. Kalau di BRI itu nasabah yang bermasalah itu didaftar hitamkan. Untuk melakukan penyelamatan kreditnya ya itu sama kayak bank-bank lain seperti rescheduling, reconditioning, restructuring.

Itu ya sama kayak bank-bank lain mas. Dan sudah ditetapkan oleh BI